

**PENGARUH DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP
TINGKAT KEMISKINAN DI KECAMATAN SENDANG AGUNG
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam**

Oleh :

**Sulton Malik Al Ghozali
NPM. 1551010305**

Jurusan : Ekonomi Syariah

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

TAHUN 1440 H / 2019 M

**PENGARUH DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP
TINGKAT KEMISKINAN DI KECAMATAN SENDANG AGUNG
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam**

Oleh :

**Sulton Malik Al Ghozali
NPM. 1551010305**

Jurusan : Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Ahmad Habibi, S.E., M.E

Pembimbing II : Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

TAHUN 1440 H / 2019 M

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang, namun lebih banyak terjadi di negara berkembang, karena kondisi pembangunan mereka yang masih belum stabil dan *sustainable*. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yaitu dengan meluncurkan berbagai instrumen kebijakan dan melalui program-program nasional untuk pemberdayaan masyarakat, program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah program dana desa dan alokasi dana desa, jumlah anggaran dana desa dan alokasi dana desa dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, akan tetapi seiring dengan besarnya jumlah dana desa dan alokasi dana desa, masalah kemiskinan masih sulit untuk diselesaikan. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengaruh dana desa dan alokasi dana desa secara parsial dan simultan terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung dan bagaimana pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung dalam perspektif Ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang diambil dari Kantor Kecamatan Sendang Agung dan BPS Kabupaten Lampung Tengah. Jenis data yang digunakan adalah data *panel* yaitu tahun 2015-2018. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda dengan dana desa (X1) alokasi dana desa (X2) dan kemiskinan (Y). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan (Uji F) dana desa dan alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kecamatan Sendang Agung, secara parsial (Uji t) dana desa berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kecamatan Sendang Agung. Sedangkan alokasi dana desa berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung. Pandangan Ekonomi Islam tentang dana desa dan alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan nilai-nilai dasar Ekonomi Islam yaitu keadilan dan tanggung jawab.

Kata kunci : *Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Kemiskinan*



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PENGARUH DANA DESA DAN ALOKASI DANA
DESA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI
KECAMATAN SENDANG AGUNG DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**Nama Mahasiswa : Sulton Malik Al Ghozali
NPM : 1551010305
Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.**

Bandar Lampung, 28 Agustus 2019

Pembimbing I

**Ahmad Habibi, S.E., M.E
NIP. 197905142003121003**

Pembimbing II

**Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy
NIP. 198605172015031005**

**Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah**

**Madnasir, S.E., M.S.I
NIP.197504242002121001**



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENGARUH DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KECAMATAN SENDANG AGUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM** disusun oleh **Sulton Malik Al Ghozali, NPM : 1551010305** Jurusan Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Rabu/28 Agustus 2019.**

TIM MUNAQSAH

Ketua Sidang : Madnasir, S.E., M.S.I

Sekretaris : Okta Supriyaningsih, S.E., M.E.Sy

Penguji 1 : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

Penguji 2 : Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I
NIP. 198008012003121001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”

(QS. An-Nisa : 58)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT telah memberikan kasih sayang serta rahmat-Nya, memberikan kemudahan kepada penulis, Dari hati yang terdalam skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Murtadlo dan Ibu Musiyah. Yang telah mengasihi dan menyayangiku dengan penuh ketulusan, yang selalu senantiasa memberikan do'a yang tulus dan ikhlas, terimakasih atas kepercayaan dan cinta kasih yang kau wujudkan dalam pengorbananmu selama ini. Semoga karya ini dapat menjadi sebab tangis harumu atas pencapaian anakmu. *Jazakumullah khoiron katsir Pak, Mak.*
2. Kepada Mas Didin Ali Ridlo, Mas Harun Al Rasyid, Mbak Siti Asmawati, Mas Muhammad Irsyad Fauzi dan adik Eva Ervina Rihayati, Muhammad Sadam Husen dan Malik Abdul Ghoni yang selalu memberikan inspirasi agar menjadi seseorang yang baik dan tekun yang selalu memotivasi penulis dengan semangat belajar yang tinggi, hal ini menjadi penyemangat bagi saya untuk dapat menyelesaikan pendidikan ini. Serta seluruh kerabat keluarga besar berkat dukungan dan do'a-nya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik semoga Allah selalu senantiasa melindungi.
3. Sahabat seperjuangan Ekonomi Syariah G 2015 dan seluruh angkatan 2015 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Semoga ilmu yang kita dapatkan selama perkuliahan bermanfaat dan ikatan ukhuwah akan selalu ditanamkan dalam diri kita.

4. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung tempat penulis menuntut ilmu semoga semakin jaya, berkualitas dan semakin didepan dengan nilai-nilai kebaikan.

RIWAYAT HIDUP

Sulton Malik Al Ghozali, yang akrab dipanggil Sulton ini dilahirkan di Desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung pada tanggal 13 Februari 1996, anak ke empat dari tujuh bersaudara merupakan putra dari pasangan Bapak Murtadlo dan Ibu Musiyah.

Riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan adalah: MI Nurul Ulum Sendang Asih pada tahun 2002 – 2008, melanjutkan pada SMP Ma'arif 8 Sendang Agung pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2001, kemudian tahun 2011 melanjutkan pendidikan di MAN 1 Pringsewu dan selesai pada tahun 2014, dan alhamdulillah pada tahun 2015 penulis bisa terus melanjutkan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam atas rahmat dan hidayah-Nya, yang telah memberikan kepada kita kemudahan dalam menuntut ilmu pengetahuan kesehatan untuk menikmati sesi-sesi kehidupan, tak lupa limpahan karunia serta petunjuk sehingga skripsi dengan judul “pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan di kecamatan sendang agung dalam perspektif ekonomi islam tahun 2015-2018”, dapat terselesaikan, yang mana mudah-mudahan dapat menambah wawasan serta bekal kita didunia maupun diakhirat. Amin. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan, terlimpahkan sepanjang siang dan malam kepada keharibaan junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu Ekonomi Syariah.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih sedalam dalam nya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

2. Madnasir, S.E.,M.S.I dan Budimansyah, S.Th.I.,M.Kom.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Sekretaris Jurusan yang senantiasa sabar dalam memberi arahan serta selalu memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ahmad Habibi, S.E., M.E dan Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy selaku pembimbing I dan II yang telah mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai, semoga pengetahuan yang diberikan selama ini bermanfaat dan barokah ilmu.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan/i Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi.
5. Sahabat-sahabat seperjuangan khususnya Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2015 khususnya kelas G semoga kita bisa dan dapat meraih kesuksesan dunia serta akhirat.
6. Kepada sahabatku Uswatun Hasanah, Nuris Nawati, Ayu Septiani dan Amrina Tuti Rosidah untuk semangat, motivasi, bantuan dan pengertiannya yang diberikan kepada penulis.
7. Untuk pria-pria hebat yang sudah Allah SWT pertemukan denganku, Ismail, Eko Prasetyo, Ahmad Nur Sidik, Erwin Syaifulloh, Arif Bijaksono terimakasih sudah selalu memberikan semangat dan motivasi disaat jenuh mengerjakan skripsi.
8. Keluarga Febimart dan KKN 279 terimakasih atas semangatnya dan pembelajaran-pembelajaran yang telah diberikan selama ini.

9. Untuk teman-teman KSPMS UIN Raden Intan Lampung yang sudah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kita selalu terikat dalam ukhuwah Islamiyah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan yang berarti dalam bidang khazanah Ekonomi Islam.

Bandar Lampung, Agustus 2019
Penulis

Sulton Malik Al Ghozali
NPM. 1551010305

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori	
1. Kebijakan	14
a. Pengertian Kebijakan Publik.....	14
b. Aspek Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Publik	15
c. Kerangka Kerja Kebijakan Publik	18
d. Tahapan Kebijakan Publik	19
2. Dana Desa	21
a. Pengertian Dana Desa	21
b. Sumber Dana Desa.....	22
c. Mekanisme Ketentuan Penyaluran Dana Desa	23
d. Tujuan Dana Desa	26

e. Hubungan Dana Desa Terhadap Kemiskinan	29
3. Alokasi Dana Desa.....	30
a. Pengertian Alokasi Dana Desa.....	30
b. Tujuan dan Prinsip Alokasi Dana Desa	31
c. Mekanisme Pencairan Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa	34
d. Hubungan Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan.....	36
4. Kemiskinan	37
a. Pengertian Kemiskinan	37
b. Penyebab Kemiskinan.....	39
c. Karakteristik Penyebab Kemiskinan.....	40
d. Program Pengentasan Kemiskinan	41
e. Kemiskinan Dalam Pespektif Ekonomi Islam	43
5. Ekonomi Islam	45
a. Pengertian Ekonomi Islam	45
b. Dasar Hukum Ekonomi Islam.....	47
c. Pengertian Sistem Ekonomi Islam	48
d. Nilai-Nilai Dalam Sistem Ekonomi Islam	49
e. Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam.....	50
B. Kajian Pustaka	53
C. Kerangka Pikir	55
D. Hipotesis	56

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	59
B. Sumber Data.....	59
C. Populasi Dan Sampel	60
D. Teknik Pengumpulan Data.....	61
E. Definisi Operasional Variabel.....	63
F. Teknik Pengolahan Data	64

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	71
--	----

B. Hasil Analisis Data	79
C. Pembahasan.....	90
1. Pengaruh Secara Parsial Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Sendang Agung Tahun 2015-2018	90
2. Pengaruh Secara Simultan Dana Desa dan Alokasi Dana Des Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Sendang Agung Tahun 2015-2018	102
3. Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Sendang Agung tahun 2015-2018 Dalam Perspektif Ekonomi Islam	105

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	114
B. Saran	116

DARTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Keluarga Miskin Kecamatan Sendang Agung	11
Tabel 2.1 Mekanisme Transfer APBN Dana Desa	24
Tabel 2.2 Skema Kerangka Pikir	58
Tabel 3.1 Jumlah Desa Kecamatan Sendang Agung	63
Tabel 4.1 Data Nama Camat	75
Tabel 4.2 Data Jumlah Penduduk	76
Tabel 4.3 Lembaga Pendidikan.....	77
Tabel 4.4 Data Luas Desa, Dusun dan RT	77
Tabel 4.5 Dana Desa Kecamatan Sendang Agung	78
Tabel 4.6 Alokasi Dana Desa Kecamatan Sendang Agung	79
Tabel 4.7 Jumlah Keluarga Miskin Kecamatan Sendang Agung	80
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas	81
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas	82
Tabel 4.10 Hasil Uji Autokorelasi	83
Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas	84
Tabel 4.12 Hasil Regresi Linier Berganda.....	85
Tabel 4.13 Hasil Uji T	88
Tabel 4.14 Hasil Uji F.....	90
Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi	91

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penunjukan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 Lembar Konsultasi Skripsi

Lampiran 3 Data Olahan SPSS

Lampiran 4 Tabel t

Lampiran 5 Tabel Durbin Watson

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Keluarga Miskin Kecamatan Sendang Agung	11
Tabel 2.1 Mekanisme Transfer APBN Dana Desa	24
Tabel 2.2 Skema Kerangka Pikir	58
Tabel 3.1 Jumlah Desa Kecamatan Sendang Agung	63
Tabel 4.1 Data Nama Camat	75
Tabel 4.2 Data Jumlah Penduduk	76
Tabel 4.3 Lembaga Pendidikan.....	77
Tabel 4.4 Data Luas Desa, Dusun dan RT	77
Tabel 4.5 Dana Desa Kecamatan Sendang Agung	78
Tabel 4.6 Alokasi Dana Desa Kecamatan Sendang Agung	79
Tabel 4.7 Jumlah Keluarga Miskin Kecamatan Sendang Agung	80
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas	81
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas	82
Tabel 4.10 Hasil Uji Autokorelasi	83
Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas	84
Tabel 4.12 Hasil Regresi Linier Berganda.....	85
Tabel 4.13 Hasil Uji T	88
Tabel 4.14 Hasil Uji F.....	90
Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut, diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemakaian judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses permasalahan yang akan dibahas. Adapun skripsi ini berjudul. **“PENGARUH DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KECAMATAN SENDANG AGUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**. Untuk itu perlu di uraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.¹

2. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui

¹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (On-Line) tersedia di <http://kbbi.web.id/pengaruh> (22 Maret 2019), pukul 13.02 WIB

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.²

3. Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%.³

4. Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri.⁴

5. Ekonomi Islam

Ekonomi islam adalah bidang ilmu ekonomi yang syarat akan prinsip-prinsip ke-Islaman yang bersumber dari Al-Quran dan as-sunnah yang menjalin dasar dari pandangan hidup Islam, yang memuat akan prinsip keadilan, pertanggungjawaban dan juga takaful (jaminan social).⁵

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul ini adalah:

² Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 1, Ayat 2.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1, Ayat 9.

⁴ Nurul Huda, et. al. *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2015), h. 23.

⁵ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), h. 62.

1. Alasan Objektif

- a. Kebijakan dana desa dan alokasi dana desa adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan serta untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, dana desa dan alokasi dana desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program desa. Salah satu tujuannya adalah pengentasan kemiskinan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007. Akan tetapi seiring dengan besarnya jumlah dana desa, masalah kemiskinan masih sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pengaruh dana desa dan alokasi dana desa dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung.

2. Alasan Subjektif

- a. Pokok bahasan skripsi ini sesuai berlandaskan jurusan yaitu Ekonomi Syariah konsentrasi ekonomi pembangunan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang merupakan suatu kajian keilmuan yang berkaitan dengan ekonomi pembangunan.
- b. Penulis optimis dapat menyelesaikan skripsi ini karena tersedianya sumber dan literatur yang tersedia di perpustakaan ataupun sumber lainnya. Seperti jurnal, artikel, dan data yang diperlukan.

C. Latar Belakang

Pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional di Indonesia merupakan salah satu upaya untuk dapat mewujudkan cita-cita bangsa yakni terciptanya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Pencapaian cita-cita tersebut dilaksanakan secara terpadu dan sistematis dalam bentuk operasional penyelenggaraan pemerintah, selaras dengan fenomena dan dinamika yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Melihat dari kondisi masyarakat Indonesia yang terperangkap akan kemiskinan dan ketidakberdayaan dalam hidup, maka diperlukan perwujudan untuk mensejahterakan masyarakat melalui upaya penanggulangan untuk mengatasi kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat.⁶ Kemiskinan juga memiliki arti yang lebih luas dari sekedar lebih rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari standar kesejahteraan seperti kebutuhan kalori minimum atau garis kemiskinan. Akan tetapi kemiskinan memiliki arti yang lebih dalam karena berkaitan juga dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek diluar penghasilan seperti akses kebutuhan minimum seperti kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi dan lain-lain.

⁶ Irfan Syauqi, Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), h. 68.

Menurut Suharto, adapun penyebab kemiskinan paling tidak ada empat penyebab terjadinya kemiskinan. Pertama, faktor individual, di mana seseorang menjadi miskin karena faktor pribadinya, seperti cacat permanen yang menyebabkan ia menjadi miskin. Kedua, faktor sosial, di mana kemiskinan terjadi akibat diskriminasi sosial yang dilakukan. Ketiga, faktor kultural, di mana seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya., seperti malas untuk bekerja dan berusaha. Keempat, faktor struktural, di mana kemiskinan terjadi akibat ketidakadilan sistem ekonomi, orang menjadi miskin akibat di miskinakan oleh sistem yang ada.⁷

Kemiskinan bukan hanya masalah Indonesia, tetapi merupakan masalah dunia sehingga lembaga-lembaga dunia seperti Bank Dunia lewat laporannya *World Development Report on Poverty* mendeklarasikan bahwa suatu peperangan yang berhasil melawan kemiskinan perlu dilakukan secara serentak pada tiga tempat.⁸

1. Pertumbuhan ekonomi yang luas dan padat karya yang menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi kelompok miskin.
2. Pengembangan SDM (pendidikan, kesehatan, dan gizi) yang memberi mereka kemampuan yang lebih baik untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi.
3. Membuat sarana jaringan pengaman sosial untuk mereka diantara penduduk miskin yang sama sekali tidak mampu untuk mendapatkan

⁷ Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. (Bandung: PT Rafika Aditama 2009), h. 70.

⁸ N. Gregory Mankiw, Euston Quah, Peter Wilson, *Pengantar Ekonomi Mikro*. (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 177.

keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dan kesempatan pengembangan SDM akibat ketidakmampuan fisik dan mental, bencana alam dan konflik sosial.

Kemiskinan dalam pandangan islam bukan hanya sekedar ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan salah satu masalah kultural dimana seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya seperti malas untuk bekerja dan berusaha. Keengganan berusaha adalah penganiayaan terhadap diri sendiri, sedangkan ketidakmampuan berusaha antara lain disebabkan oleh penganiayaan manusia lain. Ketidakmampuan berusaha yang disebabkan oleh orang lain diistilahkan pula dengan kemiskinan struktural. Kesan ini lebih jelas lagi bila diperhatikan bahwa jaminan rizqi yang dijanjikan Tuhan, ditujukan kepada makhluk yang di namainya dabbah, yang arti harfiahnya adalah “yang bergerak”⁹.

Dalam pandangan Islam, ketika berbicara mengenai kemiskinan, maka yang ditekankan adalah upaya perhatian, pembelaan dan perlindungan terhadap kelompok miskin yang dilakukan oleh mereka yang dikategorikan sebagai kelompok mampu. Pihak yang dianggap mampu diharapkan dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki, baik secara individu maupun secara kelembagaan, sehingga tingkat kemiskinan masyarakat dapat diminimalisir. Apabila kelompok mampu ini tidak mempedulikan nasib kaum miskin, maka Al-Quran menyebut mereka sebagai para pendusta agama. Islam sudah jelas

⁹ Irfan Syauqi, Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan.....*, h. 70.

memberikan perintah kepada kita untuk membantu sesama atau membantu fakir miskin, yang terdapat pada QS Ar-Rum ayat 38 :

فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

*Artinya: Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah orang-orang beruntung.*¹⁰

Ayat ini menerangkan bahwa lapang-sempitnya rezeki merupakan ketentuan Allah dan sarana untuk menguji keimanan hamba-Nya, kemudian pada ayat ini Allah meminta orang mukmin tidak hanya berinfak dan bersedekah, melainkan juga melakukan kebaikan apapun bentuknya kepada siapa saja, khususnya kaum kerabat. Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat dengan menjaga hubungan silaturahmi, berbuat kebajikan, dan berkorban untuknya, juga kepada orang miskin dengan meringankan beban hidupnya dan orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah melalui usaha-usaha baiknya. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Melalui pemberian dan pengorbanan, dalam lingkup terbatas, kerabat akan tercukupi

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 408.

kebutuhannya, dan dalam lingkup yang lebih luas, perbuatan itu akan melahirkan sikap tolong-menolong di antara sesama muslim.¹¹

Kemiskinan telah menjadi masalah yang sangat besar karena melibatkan berbagai aspek kehidupan, karena substansi kemiskinan merupakan suatu kondisi serba kekurangan terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar yang berupa makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan disebabkan oleh kelangkaan untuk mendapatkan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya untuk mendapatkan pendidikan maupun pekerjaan.¹²

Menanggapi permasalahan tersebut, maka strategi pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini untuk mengatasi masalah tersebut yaitu melaksanakan pembangunan nasional yang berorientasi dan memberi perhatian besar terhadap pembangunan desa. Pembangunan desa merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan masyarakat upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat desa. Dalam mewujudkan pembangunan desa pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah Indonesia, sehingga

¹¹ Terjemah Dan Tafsir (On-Line) Tersedia Di: <https://www.indonesiaquran.com> (20 Januari 2019). Pukul 15.01

¹² Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 65.

Indonesia memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan.

Di Indonesia sendiri, pemerintah telah berupaya untuk dapat menurunkan angka kemiskinan dengan meluncurkan berbagai program nasional untuk pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh berbagai kementerian dan lembaga. Program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah program dana desa yang dimulai pada tahun 2015 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang tersebut mencantumkan pengaturan mengenai keuangan desa dan asset desa. Pasal 72 ayat 1 menyebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Untuk memberikan pedoman lebih lanjut mengenai pendapatan desa, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Pendapatan desa yang dimaksud adalah dana desa.¹³

Dana Desa (DD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan bagi desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana desa dimaksudkan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa. Tujuan penggunaan dana desa di dalamnya adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan

¹³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72, Ayat 1.

pemberdayaan masyarakat.¹⁴ Data menunjukkan anggaran dana desa di Kecamatan Sendang Agung selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, pada tahun 2015 jumlah dana desa adalah sebesar Rp.3.950.485.779, tahun 2016 sebesar Rp 5.694.332.622, tahun 2017 sebesar Rp.7.251.463.386, dan kemudian pada tahun 2018 sebesar Rp.7.528.706.033,. Dana desa tersebut diprioritaskan untuk pembangunan desa. Selain itu, sumber pendapatan desa yang lain adalah alokasi dana desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Alokasi dana desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program desa.¹⁵ Data menunjukkan anggaran alokasi dana desa di Kecamatan Sendang Agung selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, pada tahun 2015 jumlah alokasi dana desa di Kecamatan Sendang Agung adalah sebesar Rp 1.173.081.579, tahun 2016 sebesar Rp 1.367.894.222, tahun 2017 sebesar Rp 3.753.162.881, dan pada tahun 2018 sebesar Rp 3.598.886.772,. Salah satu tujuan dari alokasi dana desa adalah pengentasan kemiskinan. Akan tetapi seiring dengan besarnya jumlah dana desa, masalah kemiskinan masih sulit untuk diselesaikan. Seperti halnya berikut ini kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung sebagai berikut.

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 1, Ayat 2.

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1, Ayat 9.

Tabel 1.1
Jumlah Keluarga Miskin Kecamatan Sendang Agung
Tahun 2015-2018

No.	Desa/Kampung	2015	2016	2017	2018
1.	Kutowinangun	200	209	222	246
2.	Sendang Agung	593	521	635	502
3.	Sendang Asih	484	434	512	436
4.	Sendang Asri	260	243	276	220
5.	Sendang Baru	407	417	462	355
6.	Sendang Mukti	240	226	264	235
7.	Sendang Mulyo	465	427	495	534
8.	Sendang Rejo	493	512	528	559
9.	Sendang Retno	240	235	264	175
Kecamatan SendangAgung		3.282	3.227	3.658	3.262

Sumber: BPS Lampung Tengah, Jumlah Keluarga Miskin Kecamatan Sendang Agung 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di berbagai desa di Kecamatan Sendang Agung masih terbilang cukup tinggi, dari data empat tahun terakhir yang di ambil dari Badan Pusat Statistik Lampung Tengah menunjukkan jumlah keluarga miskin dari tahun 2015 s.d 2018 masih fluktuatif.¹⁶

Sehubungan dengan hal tersebut, pembangunan daerah di Kecamatan Sendang Agung merupakan salah satu bagian integral dari pembangunan nasional yang terus melaksanakan upaya-upaya pengentasan kemiskinan melalui berbagai pendekatan dan terobosan sesuai dengan strategi pembangunan nasional, dan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah baik potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia maupun berbagai potensi yang dapat mendukung proses pembangunan.

¹⁶ Badan Pusat Statistik, *Jumlah Keluarga Miskin Kecamatan Sendang Agung 2019* (Online) tersedia di: www.bps.go.id. (13 Januari 2019), Pukul 15.07 WIB

Dari paparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat permasalahan tersebut ke dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Sendang Agung Dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut maka muncul rumusan masalah yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh jumlah dana desa dan alokasi dana desa secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung tahun 2015-2018?
2. Adakah pengaruh jumlah dana desa dan alokasi dana desa secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung tahun 2015-2018?
3. Bagaimana pengaruh jumlah dana desa dan alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung tahun 2015-2018 dalam perspektif Ekonomi Islam?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh jumlah dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung.

- b. Untuk mengetahui pengaruh jumlah alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung.
- c. Untuk mengetahui pengaruh jumlah dana desa dan alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung dalam perspektif Ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung.

b. Manfaat Praktis

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sehingga memperoleh gelar sarjana ekonomi dan sebagai pengalaman penulis dalam menyusun suatu karya ilmiah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasna Teori

1. Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan juga sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah dan kebijakan juga merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan kesulitan-kesulitan dan kemungkinan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.¹⁷ Ada beberapa devinisi mengenai kebijakan:

Thoha memberikan penafsiran tentang kebijakan publik sebagai hasil rumusan dari suatu pemerintahan. Dalam pandangan ini, kebijakan publik lebih di pahami sebagai apa yang di kerjakan oleh pemerintah dibandingkan dari pada proses hasil yang dibuat.¹⁸

¹⁷ Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik*. (Jakarta: FISIP Universitas Maestopo Beragama, 2014), h. 3.

¹⁸ Abdullah Ramdani, Muhammad Ali Ramdani, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik" *Jurnal Publik*, Vol. 11 No.01 Januari 2017, h. 2.

Hakim mengemukakan bahwa kebijakan publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik.¹⁹

Menurut Suharto yang mengutip dari Young dan Quinn mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkret yang berkembang di masyarakat.²⁰

Dalam kaitannya dengan definisi-definisi tersebut diatas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik yaitu pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah.

b. Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan

Menurut George C Edwards III, Pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan kosekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut

¹⁹ Taufiqurokhman, *Kebijakan.....*, h. 8.

²⁰ *Ibid* h. 8

(output, outcome). Lebih lanjut, Edwards III mengidentifikasi aspek-aspek yang diduga kuat yang berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana dan struktur birokrasi.²¹ Keempat aspek mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan masing-masing aspek saling berpengaruh terhadap aspek lainnya.

1) Kewenangan atau struktur birokrasi

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Kewenangan ini berkaitan dengan struktur birokrasi yang melekat pada posisi atau strata kelembagaan atau individu sebagai pelaksana kebijakan. Karakteristik utama dari birokrasi umumnya tertuang dalam prosedur kerja atau SOP dan fragmentasi organisasi.

2) Komunikasi

Komunikasi adalah aktivitas yang mengakibatkan orang lain menginterpretasikan suatu ide atau gagasan, terutama yang dimaksudkan oleh pembicara atau penulis melalui sistem yang biasa baik dengan simbol-simbol, signal-signal, maupun perilaku. Komunikasi mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, dimana komunikasi yang tidak baik dapat menimbulkan dampak-dampak buruk bagi pelaksanaan kebijakan. Kemampuan komunikasi

²¹ Abdullah Ramdani, Muhammad Ali Ramdhani, "Konsep Umum Pelaksanaan.....", h. 5.

diarahkan agar pelaksana kegiatan dapat berunding satu sama lain dan menemukan titik kesepahaman/konsensus yang saling menguntungkan. Konsensus yang terbangun dapat meningkatkan kinerja personel dalam bekerja dengan menemukan kondisi win-win solution pada setiap permasalahan.

3) Sumberdaya

Pelaksanaan kebijakan harus ditunjang oleh ketersediaan sumberdaya (manusia, materi dan metode). Pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumberdaya yang diperlukan, maka pelaksanaan kebijakan akan cenderung tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa dukungan sumberdaya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen yang tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat. Dengan demikian, sumberdaya merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: staf yang memadai, informasi, pendanaan, wewenang, dan fasilitas pendukung lainnya.

4) Disposisi atau Sikap Dari Pelaksana

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen, disiplin, kejujuran, kecerdasan, dan sifat demokratis. Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan dukungan atau hambatan terhadap

pelaksanaan kebijakan tergantung dari kesesuaian kompetisi dan sikap dari pelaksanaan. Karena itu, pemilihan dan penetapan personalia pelaksana kebijakan dipersyaratkan individu-individu yang memiliki kompetensi dan dedikasi yang tepat pada kebijakan yang telah ditetapkan.

c. **Kerangka Kerja Kebijakan Publik**

Kebijakan publik memiliki kerangka kerja yang disebut dengan kerangka kerja kebijakan publik. Kerangka kerja tersebut akan ditentukan oleh beberapa variabel antara lain sebagai²²:

1) Tujuan yang akan dicapai.

Yaitu mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka semakin mudah untuk mencapainya.

2) Preferensi nilai yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan.

Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit dibandingkan dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar suatu nilai.

3) Sumber daya yang mendukung kebijakan.

Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material dan infrastruktur lainnya.

²² Taufiqurokhman, *Kebijakan.....*, h. 15.

- 4) Kemampuan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan kebijakan.

Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas orang-orang yang akan terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut akan ditentukan dari tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya.

- 5) Lingkungan sekitarnya.

Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh lingkungan sosial, ekonomi, politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.

- 6) Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan.

Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja dari suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat *top-down approach* atau *bottom-up approach*, otoritas atau demokratis.

d. Tahapan Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji, tujuan pembagian ini adalah untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik. Tahap-tahap kebijakan publik sebagai berikut:²³

²³ *Ibid*, h. 16.

1) Tahap penyusunan agenda kebijakan

Dalam tahap ini ada 3 kegiatan yang perlu dilaksanakan

- a) Membangun persepsi di kalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Hal ini penting karena bisa jadi suatu gejala yang oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap sebagai masalah, tetapi oleh kelompok masyarakat yang lainnya atau bahkan oleh para elite politik bukan dianggap sebagai suatu masalah.
- b) Membuat batasan masalah. Tidak semua masalah harus masuk dalam penyusunan agenda kebijakan dan memiliki tingkat urgensi yang tinggi, sehingga perlu dilakukan pembatasan terhadap masalah-masalah tersebut.
- c) Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisasi kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa dan sebagainya.

2) Tahap formulasi dan legitimasi kebijakan

Pada tahap ini analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.

3) Tahap implementasi kebijakan

Pada tahap ini perlu memperoleh dukungan sumberdaya dan penyusunann organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik.

4) Tahap evaluasi terhadap implementasi, kinerja dan dampak kebijakan

Tindakan (implementasi) kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, yang memerlukan proses berikutnya yakni evaluasi. Hasil evaluasi tersebut berguna bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan berhasil.

2. Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.²⁴

Dana desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 1, Ayat 2.

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa sebagaimana yang dimaksud di prioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan diberikannya dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan. Undang-undang desa mengamanatkan anggaran dana desa yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan di alokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.²⁵

b. Sumber Dana Desa

Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer kepada daerah. Belanja pemerintah pusat menurut jenisnya adalah belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, pembayaran bunga utang, belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, belanja lain-lain dan transfer ke daerah yang termasuk anggaran transfer ke daerah yaitu dana otonomi khusus, dana penyesuaian dan dana perimbangan.²⁶

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, Pasal 5 Ayat 2.

²⁶ Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: ANDI, 2002), h. 36.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada pasal yang telah di amandemen pada Peraturan Pemerintah yang telah di pertimbangkan dan di rumuskan dalam pengalokasian dana desa menyatakan bahwa dana desa di alokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- 1) Alokasi dasar.
- 2) Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.²⁷

Alokasi dasar merupakan alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dari anggaran dana desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional. Ketentuan mengenai hasil alokasi yang dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap desa yaitu bersumber dari kementerian yang berwenang atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

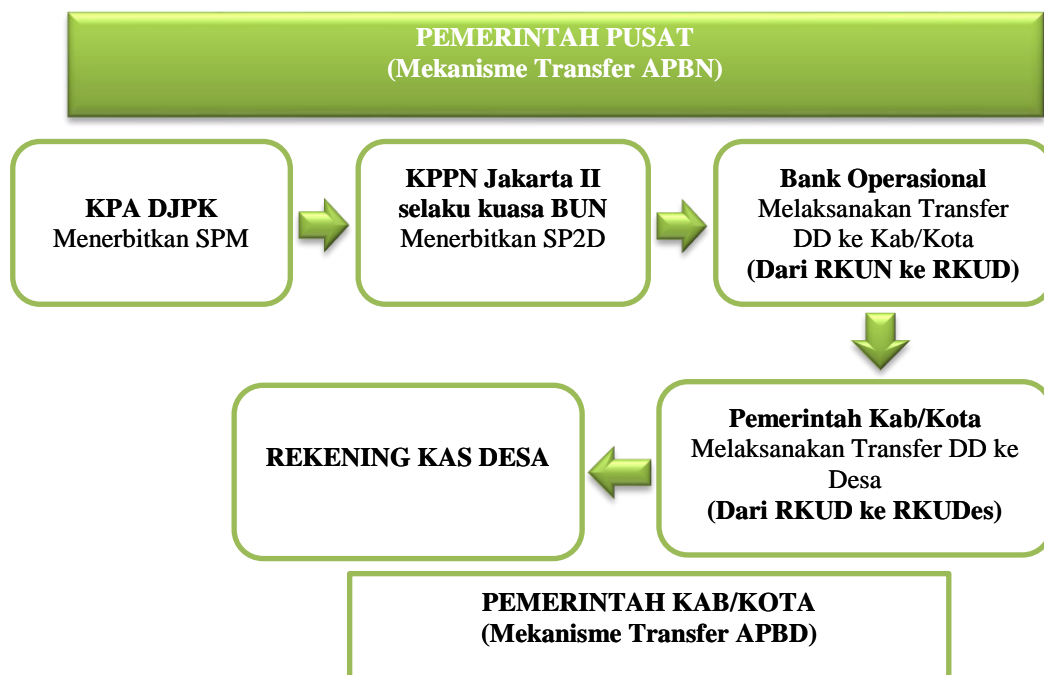
c. Mekanisme Ketentuan Penyaluran Dana Desa

Mekanisme penyaluran dana desa terbagi menjadi beberapa tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, Pasal 11.

mekanisme transfer dari RKUD ke RKUDes, seperti yang terlihat dalam gambar berikut.²⁸

Gambar 2.1
Mekanisme Transfer APBN Dana Desa



Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD, dengan ketentuan sebagai berikut:²⁹

- 1) Tahap I paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- 2) Tahap II paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen).

²⁸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa, Pasal 99 Ayat (1).

²⁹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa, Pasal 99 Ayat (2).

- 3) Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

Penyaluran dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara selaku kuasa pengguna anggaran penyaluran DAK Fisik dan dana desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:³⁰

1) Tahap I berupa:

- a) Surat pemberitahuan bahwa pemerintah daerah yang bersangkutan telah menyampaikan peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan.
- b) Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa.

2) Tahap II berupa:

- a) Laporan realisasi penyaluran dana desa tahun anggaran sebelumnya.
- b) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahun anggaran sebelumnya.

3) Tahap III berupa

- a) Laporan realisasi penyaluran dana desa sampai dengan tahap II.
- b) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sampai dengan tahap II.

³⁰ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa, Pasal 100 Ayat (1).

Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah bupati/walikota menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:³¹

- 1) Tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDes dari kepala desa.
- 2) Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa.
- 3) Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sampai dengan tahap II dari kepala desa.

d. Tujuan Dana Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana:

- 1) Desa bukan hanya sekedar sebagai objek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat.
- 2) Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.

³¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa, Pasal 102 Ayat (2).

- 3) Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat seperti pangan, energi dan layanan dasar.
- 4) Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.

Penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa. Hasil Musyawarah Desa harus menjadi acuan bagi penyusunan rencana kerja pemerintah desa dan APBDesa, rencana kerja pemerintah desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa.³²

Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program kegiatan pembangunan desa, meliputi:

- 1) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman.

³² Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, Pasal 5 Ayat (1).

- 2) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan, sosial dan kebudayaan.
- 3) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.
- 4) Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Upaya desa dalam merencanakan program dan kegiatan pembangunan desa dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa yang meliputi desa tertinggal atau sangat tertinggal, desa berkembang dan desa maju atau mandiri.³³

Sedangkan prioritas penggunaan dana desa untuk program dan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, meliputi:³⁴

- 1) Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.

³³ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, Pasal 6 & 7 Ayat (1).

³⁴ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, Pasal 8 Ayat (1).

- 2) Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDes atau dukungan BUMDes Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.
- 3) Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa.
- 4) Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa (*Community Centre*).
- 5) Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa.
- 6) Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai desa dan hutan/pantai kemasyarakatan.
- 7) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.
- 8) Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

e. Hubungan Dana Desa Terhadap Kemiskinan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dalam penelitian Handra Hefrizal dkk, pada tahun 2017 yang meneliti pengaruh dana

desa dan penanggulangan kemiskinan, menyatakan bahwa dana desa mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan desa. Tujuan program dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan sarana dan prasarana desa, pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang keseluruhan melibatkan penduduk desa, baik penduduk miskin maupun bukan penduduk miskin dalam pelaksanaannya.³⁵

Banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan desa, salah satunya adalah dana desa. Dengan semakin besarnya dana desa, diharapkan sarana prasarana desa terpenuhi, kebutuhan dasar terpenuhi, potensi ekonomi lokal dapat dikembangkan, serta sumber daya alam dan lingkungan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan yang kemudian akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat, pendapatan yang meningkat akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pula sehingga jumlah kemiskinan akan tertekan atau angka kemiskinan akan menurun.

3. Alokasi Dana Desa

a. Pengertian Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana

³⁵ Hefrizal, Hendra, et. al. "Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan". *Kompak*, Februari 2017, h. 14-15.

perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%.³⁶ Alokasi dana desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program desa. Dalam Peraturan disebutkan bahwa bagian dari dana keseimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.

Alokasi dana desa pada hakekatnya merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk meyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini karena desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota dan bagian dari dana keseimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima.

b. Tujuan dan Prinsip Alokasi Dana Desa

Tujuan dari alokasi dana desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu untuk:³⁷

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.

³⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1, Ayat 9.

³⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 19.

- 4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- 5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- 7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- 8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Miliki Desa (BUMDesa).

Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 pasal 20 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pengelolaan alokasi dana desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Rumus yang dipergunakan dalam alokasi dana desa adalah:

- 1) Azas Merata adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- 2) Azas Adil adalah besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Besarnya prosentase perbandingan antara asas merata dan adil adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam

puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.³⁸

Alokasi dana desa tersebut akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintahan desa dan masyarakat desa. Pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat desa agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaan alokasi dana desa yang diterimanya. Sehingga diperlukan adanya kerja sama yang saling mendukung, pada akhirnya terciptanya pemerataan pembangunan, khususnya di perdesaan akan lebih meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat perdesaan, mendorong keterlibatan aktif pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan sebagai berikut:

- 1) Seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
- 2) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.

³⁸ Lampiran Permendagri (On-line), tersedia di keuda.permendagri.go.id (13 Januari 2019) pukul 10.39

- 3) Alokasi dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- 4) Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
- 5) Alokasi dana desa harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.³⁹

Berdasarkan prinsip tersebut pengelolaan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan bagi pengelolaan keuangan desa dalam APBDes, seluruh kegiatan yang dibiayai alokasi dana desa di rencanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administrative, secara teknis, dan secara hukum, alokasi dana desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efesien, efektif, berkeadilan dan terkecuali.

c. Mekanisme Pencairan Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa

Mekanisme pencairan dan penyaluran alokasi dana desa yaitu:

- 1) Pencairan alokasi dana desa dilakukan secara bertahap dengan persentase tertentu yang telah ditetapkan.

³⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Desa, Pasal 96 Ayat (1).

- 2) Pencairan pertama diajukan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat disertai kelengkapan administrasi yang ditentukan
- 3) Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama adalah dipertanggungjawabkan baik secara administrative, secara teknis dan dasar hukum.
- 4) Pencairan baik tahap pertama maupun tahap kedua dilakukan dengan pemindahan bukuan dana rekening kas daerah ke rekening kas desa.
- 5) Penyaluran alokasi dana desa dari kas kepada pelaku aktivitas (pimpinan pelaksanaan kegiatan) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke kepala desa melalui sekretaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
 - b) Sekretaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekretaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang di tanda tangani oleh kepala desa.
 - c) Bendahara desa telah menerima SPM dan surat rekomendasi camat mencairkan kepada pemenang kas desa pada bank yang ditunjuk.

- d) Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam buku harian umum untuk selanjutnya diserahkan kepada pemimpin kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.⁴⁰

d. Hubungan Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 dalam penelitian Prihartini Budi Astuti pada 2012, yang meneliti pengaruh alokasi dana desa terhadap kemiskinan, menyatakan bahwa alokasi dana desa mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan desa. Tujuan alokasi dana desa adalah menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, yang dalam pelaksanaannya melibatkan penduduk desa, baik penduduk miskin maupun bukan penduduk miskin.

Dengan semakin besarnya alokasi dana desa, diharapkan jumlah kemiskinan akan tertekan sehingga angka kemiskinan akan menurun. Selain itu, pembangunan infrastruktur maupun nilai sosial budaya perdesaan akan meningkat.

⁴⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 3.

4. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa sandang, pangan, maupun papan.⁴¹ Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak pada berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Kemiskinan (*proverty*) merupakan istilah yang menyatakan tidak adanya kenikmatan hidup dan persediaan kebutuhanpun tidak sebanding. Istilah ini didefinisikan sebagai suatu titik kehilangan untuk pemeliharaan efisiensi secara fisik, atau suatu keadaan ekonomi dimana terbatasnya peluang atau kesempatan yang dimiliki kelompok tersebut dalam mengakses sumber daya pembangunan.

Kemiskinan adalah suatu permasalahan yang tidak saja dialami oleh negara berkembang namun di negara majupun kemiskinan suatu

⁴¹ Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, (Yogyakarta: YKPN, 2002), h. 112.

masalah yang pelik untuk diselesaikan. Ada beberapa definisi mengenai kemiskinan:⁴²

- 1) Bappenas mendefinisikan kemiskinan adalah dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
- 2) Menurut Sumitro Djojohadikusumo pola kemiskinan ada empat yaitu, Pertama adalah persistent proverty adalah kemiskinan yang kronis atau turun temurun, Kedua clicical proverty adalah yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan, Ketiga seasonal proverty adalah kemiskinan musiman yang menimpa nelayan dan petani, Keempat accidental proverty adalah akibat bencana alam sehingga menurunkan tingkat kesejahteraan.⁴³
- 3) Al-Ghozali mendefinisikan kemiskinan sebagai letidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri.⁴⁴

Berdasarkan definisi-definisi diatas kemiskinan merupakan salah satu hambatan dalam meningkatkan kesejahteraan karena kemiskinan mempunyai tolak ukur yang bukan hanya kekurangan dalam pangan

⁴² Chalid, Nursiah dan Yusuf, Yusbar, Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 22 No 2, Juni 2014

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Nurul Huda, et. al. *Ekonomi Pembangunan.....*, h. 23.

dan tingkat pendapatan yang rendah, akan tetapi tingkat kesehatan, pendidikan dan perlakuan adil di muka hukum dan sebagainya.⁴⁵

b. Penyebab Kemiskinan

Menurut World Bank salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (lack of income and assets) untuk memnuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (acceptable). Disamping itu kemiskinan juga berkaitan dengan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikatakan miskin (poor) adalah tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan tidak memadai.⁴⁶

Kuncoro dan Safi'i berpendapat penyebab kemiskinan bisa dianalisis melalui dua aspek, yaitu aspek sosial dan ekonomi. Karena kedua aspek tersebut saling berkaitan. Adapun penyebabnya yaitu:⁴⁷

- 1) Rendahnya akses terhadap lapangan pekerjaan. Tingkat kesempatan kerja adalah rasio antara jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja.
- 2) Lemahnya akses masyarakat terhadap faktor produksi, lemahnya akses tersebut jika dijabarkan yaitu:
 - a) Rendahnya akses modal usaha.

⁴⁵ Novita Dewi, "Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Propinsi Riau", *Jom Fekon*, Vol .4 No. (1 Februari 2017), h. 871.

⁴⁶ *Ibid.* h. 871

⁴⁷ Christina Usмалиadanti, "Analisis Pengaruh Tingkat kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah sekor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan manusia Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009".(Disertasi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, 2011), h. 34.

b) Lemahnya masyarakat dalam mengakses pasar.

c) Sedikitnya kepemilikan aset.

Selain kemiskinan dipandang dari segi ekonomi, kemiskinan juga dapat dilihat dari akses sosial. Adapun hal tersebut dapat dijabarkan yaitu:

- 1) Rendahnya akses pendidikan. Pada negara terbelakang, pendidikan pada masyarakatnya terbilang rendah sehingga produktifitasnya akan rendah dan mengakibatkan penghasilan menjadi rendah.
- 2) Rendahnya akses fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan di negara terbelakang jauh lebih sedikit dan tertinggal oleh negara maju.

c. Karakteristik Penyebab Kemiskinan

Beberapa ciri-ciri yang melekat pada penduduk miskin yaitu:

- 1) Pendapatan masih rendah atau tidak berpendapatan.
- 2) Tidak memiliki pekerjaan tetap.
- 3) Pendidikan rendah bahkan tidak berpendidikan.
- 4) Tidak memiliki tempat tinggal.
- 5) Tidak terpenuhinya standar gizi minimal.⁴⁸

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) karakteristik untuk menentukan rumah tangga miskin sebagai berikut:

- 1) Luas bangunan peranggota rumah tangga/keluarga kurang dari 8 meter persegi.
- 2) Lantai rumah berupa tanah/papan dengan kualitas rendah.

⁴⁸ Tri Wahyu Rejekiingsih, "Identifikasi Penyebab Kemiskinan Di kota Semarang Dari Dimensi Kultursal", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.72 No.1, (Juni 2011), h. 34.

- 3) Dinding rumah berupa bambu/papan dengan kualitas rendah.
- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar / bersama-sama dengan rumah tangga lain Sumber air minum bukan air minum bersih.
- 5) Sumber penerangan yang digunakan bukan listrik.
- 6) Jenis bahan bakar untuk memasak adalah kayu/arang
- 7) Hanya sanggup makan satu sampai dua kali dalam sehari.
- 8) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
- 9) Tidak memiliki kemampuan berobat ke puskesmas/poliklinik.
- 10) Lapangan pekerjaan berupa petani/nelayan atau pekebun.
- 11) Pendidikan kepala rumah tangga tidak tamat SD/tidak sekolah.
- 12) Tidak memiliki asset/barang berharga minimal Rp 500.000.
- 13) Jumlah penghasilan penduduk yang menjadi batas garis kemiskinan sebesar Rp 361.1990,- perkapita perbulan.

Jika minimal 9 (Sembilan) variabel terpenuhi, maka dikategorikan sebagai rumah tangga miskin atau tidak sejahtera.⁴⁹

d. Program Pengentasan Kemiskinan

Untuk meningkatkan efektivitas dalam upaya penanggulangan kemiskinan presiden telah mengeluarkan Perpres No. 15 tahun 2010 tentang penanggulangan kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8% sampai 10% pada akhir tahun 2014. Melalui Tim Nasional Percepatan

⁴⁹ Badan Pusat Statistik, *Indikator Kemiskinan*, (On-line) tersedia di: www.bps.go.id. (7 April 2019), Pukul 23:42 WIB

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah koordinasi Wakil Presiden Republik Indonesia, telah mengklasifikasikan kebijakan dalam tiga kelompok (cluster) yaitu sebagai berikut.⁵⁰

1) Klaster I

Klaster I adalah kelompok kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial. Fokus utama kebijakan ini adalah untuk pemenuhan hak dasar yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan yang lebih baik. Mekanisme pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

2) Klaster II

Klaster II adalah kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat. Fokus utama program ini adalah untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan yang dimaksudkan agar masyarakat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Jenis program Klaster II ini adalah PNPM Mandiri, dan pada tahun 2014 PNPM Mandiri telah resmi berakhir dan kemudian di gantikan dengan program Dana Desa.

⁵⁰ TNP2K, *Program Penanggulangan Kemiskinan*, tersedia di tnp2k.go.id/id/program/sekilas/, (12 Februari 2019), pukul 10:28 WIB

3) Klaster III

Klaster III adalah kebijakan berbasis pemberdayaan usaha mikro yang memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya dengan memberikan modal atau pembiayaan dalam skala mikro. Program pada Klaster III ini adalah Kredit Usaha Rakyat.

e. Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kemiskinan adalah kondisi seseorang atau kelompok atas ketidakmampuan dalam memenuhi ekonomi, sosial dan politik dikehidupan untuk mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan menurut pandangan Islam merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (Al-hayah Al-Tayyibah).⁵¹

Islam memandang kemiskinan menjadi tiga bagian, yaitu miskin iman, miskin ilmu dan miskin harta.⁵² Dalam hal ini penulis akan membahas miskin harta dalam pandangan islam. Islam memandang baik fakir maupun miskin sama-sama harus dibantu terlepas apapun definisinya secara bahasa. Fakir dalam perspektif islam adalah suatu keadaan yang serba kekurangan dan tidak memiliki kemampuan untuk memperbaikinya. Sedangkan miskin adalah keadaan dimana seseorang sudah bekerja, tetapi masih belum mencukupi kebutuhan hidupnya.⁵³

⁵¹ Amirus Sodik, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 3 No.2, (Desember 2015), h. 387.

⁵² Al-arif, M Noer Rianto. *Teori Makro Ekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta. 2010), h. 231

⁵³ *Ibid*, h. 232

Islam sangat memandang penting permasalahan kemiskinan ini karena kefakiran akan menyebabkan lemahnya iman. Rosululloh SAW sangat memperhatikan permasalahan ini, sehingga beliau dalam pengelolaan keuangan negara menggunakan prinsip langsung menyalurkan semua dana yang dimiliki kepada para mustahik sampai habis tanpa menyisakannya. Kebijakan anti kemiskinan pun turut dianut oleh para Khulafaur Rasyidin yang merupakan penerus perjuangan Rosululloh SAW, sehingga pengelolaan dan pendayagunaan zakat pada masa tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat. Kesejahteraan umat menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan dalam kebijaksanaan pembangunan negara.⁵⁴

Menurut Al-Ghozali, mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka, baik itu kebutuhan material dan kebutuhan rohani. Pendapat tersebut dibuat oleh Ahmed, kemiskinan bukan hanya perampasan barang dan jasa, tetapi kurangnya kemiskinan dalam roh. Islam menganggap kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan ahlak, keluarga dan juga masyarakat. Dengan demikian kemiskinan mempunyai dampak buruk terhadap masyarakat yang mengalami situasi tersebut. Al- Qur'an memberikan peringatan terhadap manusia yang melalaikan kemiskinan, seperti dalam surah Al Maa'uun ayat 1-7:

⁵⁴ Al-arif, M Noer Rianto. *Teori Makro Ekonomi*....., h.233.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾
 وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ
 عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَآؤُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ
 الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

Artinya : ”tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama, Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin, Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan enggan (menolong dengan) barang berguna.” (Q.S Al-Quran Al-Maa’uun: 1-7)⁵⁵

Ayat tersebut menegaskan bahwa seseorang yang lupa akan agama, lalai atas kewajibanya (sholat) dan tidak tolong menolong niscaya Allah akan mencelakalah dan mereka lah orang-orang yang termaksud dalam mendustakan agama. Tolong menolong adalah hal yang wajib bagi umat manusia seperti dalam nilai-nilai ekonomi islam mengajarkan untuk saling tolong menolong dan Allah menempatkan manusia sebagai makhluk yang mulia.⁵⁶

5. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Berbagai definisi mencoba memberikan nama dan arti ekonomi islam. Beberapa ekonom muslim berusaha mendefinisikan, tetapi hal itu tidak lepas dari konteks permasalahan ekonomi yang mereka hadapi,

⁵⁵ Departemen Kementerian Agama, *Al Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 602.

⁵⁶ Jaenal Efendi, ”Strategi Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, (Disertasi Program Studi Ekonomi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, jakarta, 2005), H. 44.

sehingga terkesan terdapat perbedaan dalam mendefinisikan ekonomi islam.

Adapun definisi-defini tersebut antara lain:

- 1) Monzer Kafh (1995) mendefinisikan ekonomi islam sendiri dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari paradigma islam yang sumbernya merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah.
- 2) Muhammad Abdul Mannan (1997), mendefinisikan sebagai ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai islam.
- 3) Metwally (1995), menurutnya ekonomi islam dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat islam yang mengikuti Al-Qur'an dan Sunah Nabi SAW, ijma, dan qiyas.
- 4) Umar Chapra (1981) mengartikan ilmu ekonomi islam adalah suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka yang sesuai dengan muqashid, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkesinambungan, membentuk solidaritas keluarga, sosial dan jaringan moral masyarakat.
- 5) M. Nejatullah Sidiqqi (1985) mendefinisikan ilmu ekonomi islam adalah jawaban dari pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan

ekonomi pada zamannya, dengan panduan Qur'an dan Sunnah, akal dan pengalaman.⁵⁷

Sebagaimana Firman Allah dalam surah Al - Baqarah Ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۗ ...

*Artinya: "ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat, Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." (QS.Al-Baqarah:30)*⁵⁸

Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah dimuka bumi ini bukan membuat kerusakan dengan sumber daya alam yang ada. Jadi Ekonomi Islam yaitu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

b. Dasar Hukum Ekonomi Islam

Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah. Al-Qur'an juga memberikan hukum-hukum Ekonomi yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita Ekonomi Islam itu sendiri. Al Qur'an sumber hukum-hukum ekonomi yang dapat menciptakan kesetabilan dalam perekonomian itu sendiri.⁵⁹

Sebagaimana Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 80:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ تَوَلٰٓى فَمَا اَرْسَلْنَاكَ حَفِیْظًا عَلَیْهِمْ ؕ

⁵⁷ Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Mikro Pespektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 11

⁵⁸ Departemen Kementerian Agama, *Al Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta:Maghfirah Pustaka, 2006), h. 5.

⁵⁹ Hukum Ekonomi Islam, (ON-Line) tersedia di: <http://Islam.cendikia.com/> 2014 / 02 / hukum-ekonomi-islam-dalam-sumber-hukum-Al-Qur'an. (28 maret 2018) pukul 21.37

Artinya: “Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barang siapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.”(QS.AnNisa:80)⁶⁰

ayat diatas menyatakan bahwa Al-Qur'an menjelaskan hukum-hukum syara' itu secara keseluruhan, karena penjelasan-penjelasan As-Sunnah berasal dari Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai sumber pokok bagi semua hukum Islam, seperti memerintahkan kepada manusia agar memenuhi janji (perikatan) dan menegaskan halalnya jual beli beserta haramnya riba.

c. Pengertian Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi islam merupakan sistem ekonomi yang adil dan seksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak berkumpul pada satu kelompok saja, tapi tersebar keseluruh masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi setiap masyarakat untuk membangun sistem ekonomi islam sesuai dengan nilai-nilai budaya yang bersangkutan.⁶¹

Setiap masyarakat menghadapi permasalahan ekonomi dan mereka harus memiliki sistem yang mampu mengontrol dan memecahkan masalah ekonomi tersebut, ini sangat diperlukan karena satu masyarakat berbeda dengan masyarakat yang lainnya.

Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8:

⁶⁰ Departemen Kementerian Agama, *Al Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta:Maghfirah Pustaka, 2006), h. 91.

⁶¹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS.Al-Maidah:8)⁶²

Ayat diatas menerangkan bahwa islam memberi penjelasan tentang keadilan dalam segala hal, karena adil lebih dekat dari takwa.

d. Nilai-Nilai Dalam Sistem Ekonomi Islam

Secara khusus, nilai-nilai, prinsip dan tujaun dalam sistem ekonomi islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang mempunyai dasar dari pandangan hidup islam. Selalu dipegang dalam menghadapi perkembangan zaman dan perubahan masyarakat. Semua permasalahan yang berkembang, termasuk ekonomi harus tetap tunduk pada prinsip syari'at.

Bersumber dari pandangan hidup islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yakni:⁶³

- 1) Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran.

⁶² Departemen Kementerian Agama, *Al Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 108.

⁶³ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi.....*, h. 62.

- 2) Tanggung Jawab atau Amanah, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan secara pribadi dan kelompok tertentu.
- 3) Tafakul (jaminan jawab sosial), adanya tanggungjawab sosial di masyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertical, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.

e. Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam

Prinsip dan tujuan dalam ekonomi islam, juga bersumber pada ajaran syar'i yang dikembangkan dan dijabarkan lebih lanjut oleh para ulama dan cendekiawan muslim. Sebagai mana prinsip yang ditanamkan sistem ekonomi Islam yang meliputi:⁶⁴

- 1) Tauhid, melahirkan kesadaran tanggung jawab penuh kepada Allah dalam berekonomi, serta memahami ekonomi sebagai perintah ibadah. Aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak hanya mengutamakan nilai ekonomis, namun juga di iringi pengakuan

⁶⁴ *Ibid*, h. 65.

terhadap keesaan Allah sehingga apa yang dilakukan harus penuh dengan tanggung jawab.

- 2) Khalifah, kesadaran sebagai wakil Allah di mukabumi melahirkan sikap berekonomi yang benar sesuai dengan tuntunan syar'i, berekonomi semata-mata untuk kemaslahatan umat, dan upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia. Prinsip ini mengutamakan kemakmuran kelompok, orang-perorang atau bahkan kepentingan pribadi sekalipun.

Selain dua prinsip tersebut, terdapat beberapa prinsip tambahan yang menjadi kaidah-kaidah pokok dalam membangun kerangka ekonomi Islam, yakni: kerja, efisiensi, kompensasi, profesionalisme, pemerataan kesempatan, persaingan, keseimbangan, informasi simetri dan solidaritas.

Sistem ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan semata, namun juga menjamin terwujudnya tujuan syari'ah. Hal inilah yang membedakan secara jelas antara tujuan dalam ekonomi konvensional yang tidak memberi tempat pada unsur keimanan.

Tujuan syar'i akan menjiwai manusia untuk bertindak baik bagi dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Keimanan terletak pada urutan pertama tak lain karna keimanan akan memberikan cara pandang terhadap yang dapat mempengaruhi kepribadian dan sikap mental seseorang. Seperti misalnya: perilaku, gaya hidup, selera, sikap terhadap

manusia dan lingkungan sekita. Sikap mental tersebut, secara ekonomi akan mempengaruhi sifat, kualitas dan kuantitas kebutuhan material dan cara pemenuhan kebutuhannya.⁶⁵

Menurut Abdul Mannan landasan ekonomi islam didasarkan pada tiga konsep *fundamental*, yaitu keimanan kepada Allah SWT (*tauhid*), kepemimpinan (*khalifah*), dan keadilan (*a'dalah*). Tauhid adalah konsep yang paling penting dan mendasar, sebab konsep yang pertama adalah dasar pelaksanaan aktivitas baik yang mencakup ibadah (*abudillah*) mahdah (berkat sholat, dzikir dan sebagainya), termasuk ekonomi (*mu'amalah*), muasyarah, hingga akhlak.⁶⁶

Ekonomi yaitu bagian dari mu'amalah secara umum dalam konsep islam harus memperhatikan prinsip *tauhid*, *khalifah* dan keadilan (*a'dalah*), yang harus berdampingan manakala akan mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera *al-falah*.⁶⁷

Ekonomi islam memandang bahwa keberadaan manusia dan sumber-sumber yang dimiliki tidak terlepas dari batasan dan norma-norma yang mengikat. Apa yang dimiliki adalah ciptaan Tuhan, tentunya akan melahirkan tanggungjawab atas apa yang dilakukan dalam menggunakan sumber daya-sumber daya yang terbatas sehingga diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada,

⁶⁵ *Ibid*, h. 67.

⁶⁶ Lukman Hakim, *prinsip prinsip ekonomi islam*, (Jakarta: Airlangga, 2012), h. 4.

⁶⁷ *Ibid*, h. 6.

dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan dan menciptakan keadilan dalam ekonomi umat.⁶⁸

Pada dasarnya kebijakan ekonomi secara khusus diarahkan untuk memecahkan persoalan penting yang dihadapi suatu sistem ekonomi. Tidak terkecuali masalah dana desa dan alokasi dana desa yang merupakan salah satu sasaran kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam anggaran untuk desa, sehingga tercipta keadilan di masyarakat secara luas.

B. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu. Ini disadari untuk melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang diberikan penjelasan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian.

Setianingsih, penelitian yang dilakukan pada tahun 2016, dengan judul “Kontribusi Dana Desa Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan di Kabupaten Melawi”. Hasil dari penelitiannya adalah variabel yang berpengaruh terhadap kemiskinan adalah dana desa, hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis yang menyatakan hanya variabel dana desa yang berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. Dari uji regresi data panel koefisien dana desa sebesar 1.10 mengandung arti kontribusi dana desa dalam menambah penduduk

⁶⁸Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi.....*, h. 53.

miskin sebesar 1.10%. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan.

Azwardi & Sukanto, penelitian yang dilakukan pada tahun 2014, dengan judul “Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan”. Merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan analisis inferensial dalam bentuk data time series dengan menggunakan alat analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh negative antara alokasi dana desa terhadap kemiskinan, demikian juga dengan hasil simulasi ADD minimal 10% terhadap kemiskinan menunjukkan hubungan negatif pula.

Sari & Abdullah, penelitian yang dilakukan pada tahun 2017, dengan judul “Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa Di Kabupaten Tulungagung”. Analisis penelitian tersebut jenis data yang digunakan regresi berganda menunjukkan adanya pengaruh negatif antara alokasi dana desa terhadap kemiskinan, demikian juga hasil kemiskinan yang negatif dan signifikan di Kabupaten Tulungagung.

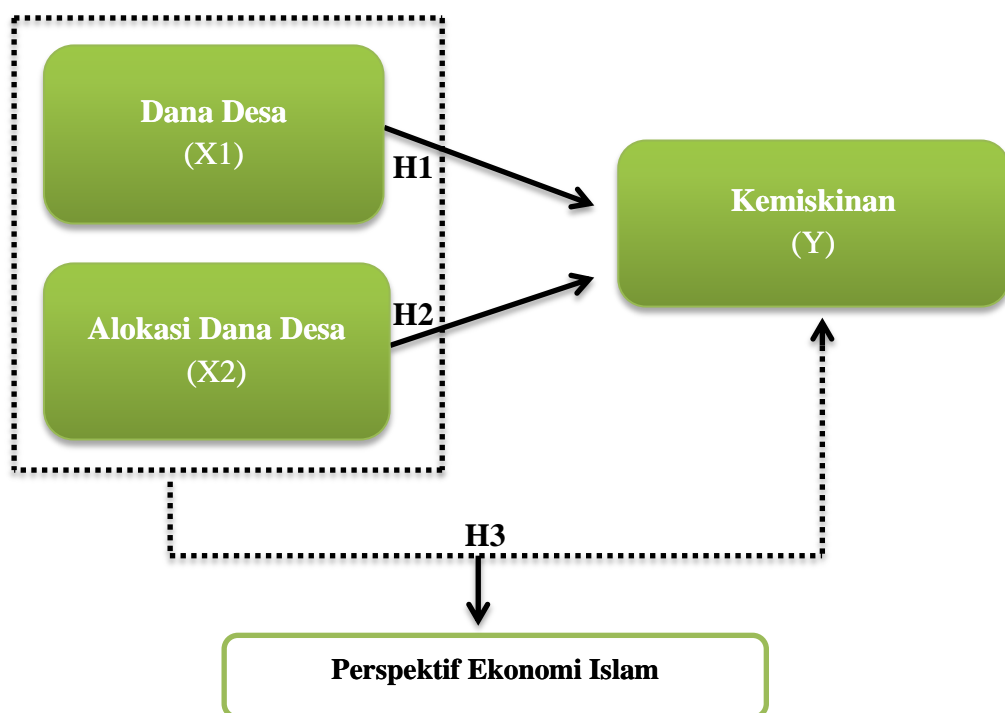
Nilam Indah Susilowati dkk, penelitian yang dilakukan pada tahun 2017, dengan judul “Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Belanja Modal Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Di Jawa Timur”. Hasil penelitian menunjukan bahwa semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,99 dan 0,01 dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini. Alokasi Dana Desa, Belanja

Modal dan PDRB efektif dan berhasil dalam mengurangi kemiskinan tiap Kabupaten/Kota. Sedangkan Dana Desa tidak efektif dan tidak berhasil dalam mengurangi kemiskinan di tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Riyanto junaedi, penelitian yang dilakukan pada 2017, dengan judul “Implikasi Penggunaan Dana Desa Terhadap Ketahanan Sosial, Ekonomi Dan Ekologi Desa Tertinggal Di Kabupaten Karanganyar”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif, metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana desa berimplikasi positif terhadap ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi desa di Kabupaten Karanganyar.

C. Kerangka Pikir

Gambar 2.2
Skema Kerangka Pikir



Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dalam kerangka pemikiran diatas penulis mencoba menguraikan terhadap variabel X1 (Dana Desa) X2 (Alokasi Dana Desa). Terhadap variabel Y (Kemiskinan). Sehingga dari kerangka pemikiran diatas dapat menjadi hipotesis penelitian.

D. Hipotesis

1. Pengaruh Dana Desa terhadap kemiskinan

Menurut Hefrizal Hendra dkk, yang meneliti pengaruh dana desa dan penanggulangan kemiskinan, menyatakan bahwa dana desa mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan desa. Tujuan program dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan sarana dan prasarana desa, pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang keseluruhan melibatkan penduduk desa, baik penduduk miskin maupun bukan penduduk miskin dalam pelaksanaannya.⁶⁹

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Setianingsih, pada penelitian yang dilakukan tahun 2016, dengan judul “Kontribusi Dana Desa Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan di Kabupaten Melawi” hasil dari penelitiannya adalah variabel yang berpengaruh terhadap kemiskinan

⁶⁹ Hefrizal, Hendra, et. al. “Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan”. *Kompak*, Februari 2017, h. 14-15.

adalah dana desa, hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis yang menyatakan hanya variabel dana desa yang berpengaruh terhadap kemiskinan.⁷⁰ Jadi hipotesis di penelitian ini adalah:

- a. H0: Dana Desa (X1) tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan (Y) di Kecamatan Sendang Agung tahun 2015-2018.
 - b. H1: Dana Desa (X1) berpengaruh terhadap Kemiskinan (Y) di Kecamatan Sendang Agung tahun 2015-2018.
2. Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap kemiskinan

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 dalam penelitian Budi Prihartini Astuti pada 2012 yang meneliti pengaruh ADD terhadap kemiskinan, menyatakan bahwa ADD mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan desa. Tujuan ADD adalah menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, yang dalam pelaksanaannya melibatkan penduduk desa, baik penduduk miskin maupun bukan penduduk miskin.⁷¹

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Azwardi dan Sukanto, pada tahun 2014, dengan judul “Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan

⁷⁰ Nilam Indah Susilowati, Dwi Susilowati, Samsul Hadi, “Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Belanja Modal dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Di Jawa Timur”. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vo; 1 Tahun 2017, h. 517.

⁷¹ *Ibid*, h. 516.

Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara alokasi dana desa terhadap kemiskinan.⁷²

- a. H0: Alokasi Dana Desa (X2) tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan (Y) di Kecamatan Sendang Agung 2015-2018.
 - b. H2: Alokasi Dana Desa (X2) berpengaruh terhadap Kemiskinan (Y) di Kecamatan Sendang Agung tahun 2015-2018.
3. Pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan
- a. H0: Dana Desa (X1) dan Alokasi Dana Desa (X2) tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan (Y) di Kecamatan Sendang Agung 2015-2018.
 - b. H3: Dana Desa (X1) Alokasi Dana Desa (X2) berpengaruh terhadap Kemiskinan (Y) di Kecamatan Sendang Agung tahun 2015-2018.

⁷² *Ibid*, h. 518.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditetapkan.⁷³

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Adapun variabel independen adalah dana desa (X1) dan alokasi dana desa (X2) dan variabel dependen adalah kemiskinan (Y).⁷⁴

B. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti dapat mencari melalui sumbernya. dengan kata lain, data sekunder di dapat dari dokumen-dokumen atau penelitian penelitian terdahulu yang datanya sudah tersusun. Data sekunder

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 8.

⁷⁴ *Ibid*, h. 57.

yang digunakan bersumber dari BPS Provinsi Lampung untuk data kemiskinan dan Kantor Kecamatan Sendang Agung untuk data dana desa dan alokasi dana desa. Pengambilan dari sumber BPS karena merupakan lembaga survei yang independen dan obyektif. Jenis data yang digunakan adalah berbentuk *panel* tahun 2015-2018.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.⁷⁵ Menurut Kuncoro, Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajari atau menjadi objek penelitian.⁷⁶ Yang akan diambil dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dan diambil melalui data Dinas Pengembangan Masyarakat Desa Provinsi Lampung, BPS Kabupaten Lampung Tengah dan Kantor Kecamatan Sendang Agung berdasarkan jangka waktu tentang dana desa, alokasi dana desa dan kemiskinan.

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif.....*, h. 117.

⁷⁶ Mudjarat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi Keempat* (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 188.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.⁷⁷ Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik yang menentukan sampel dalam pertimbangan atau kriteria tertentu.⁷⁸ Dalam hal ini penulis menggunakan sampel data Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Kemiskinan pada 9 Desa di Kecamatan Sendang Agung pada tahun 2015-2018. Berikut data jumlah 9 Desa di Kecamatan Sendang Agung:

Tabel 3.1
Jumlah Desa Kecamatan Sendang Agung
2019

No.	Desa/Kampung
1.	Kutowinangun
2.	Sendang Agung
3.	Sendang Asih
4.	Sendang Asri
5.	Sendang Baru
6.	Sendang Mukti
7.	Sendang Mulyo
8.	Sendang Rejo
9.	Sendang Retno

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Tengah 2019

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

⁷⁷ Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 81.

⁷⁸ Suharmis Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.183.

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk menghimpun secara selektif bahan-bahan yang dipergunakan didalam kerangka atau landasan teori, dan penyusunan hipotesis secara tajam.⁷⁹ Dokumentasi yaitu pengumpulan data dilakukan dengan kategori dan klasifikasi data-data tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian dari berbagai sumber antara lain buku-buku dan jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Dalam hal ini data dokumen yang di dapat penulis yaitu data-data yang berhubungan dengan dana desa, alokasi dana desa dan kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung.

2. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang digunakan selain menggunakan dokumentasi dan wawancara juga menggunakan kepustakaan. Teknik kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.⁸⁰ Penelitian kepustakaan yang dimaksud dalam penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat bahan dari berbagai literatur yang berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini yaitu tentang penggunaan teori-teori yang ada untuk menganalisis data.

⁷⁹ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2007), h. 191.

⁸⁰ Kartini Hartono, *Pengantar Metodologi Research* (Bandung: Kencana, 1998), h. 141.

E. Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek penelitian, sedangkan operasional variabel adalah penjelasan mengenai cara-cara tertentu yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur (mengoperasionalkan) *construct* menjadi variabel penelitian yang dapat dituju. Sehingga memungkinkan peneliti yang lain untuk melakukan refleksi (pengulangan) pengukuran dengan cara yang sama, atau mencoba mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik.⁸¹ Dalam penelitian ini digunakan dua jenis variabel penelitian, yaitu variabel terikat (dependent variabel) dan variabel bebas (independent variabel).

1. Variabel Bebas (independent variabel) (X)

Variabel bebas adalah suatu variabel yang variasinya mempengaruhi variabel lain. Dapat pula dikatakan variabel bebas adalah variabel yang pengaruhnya terhadap variabel lain yang ingin diketahui.⁸² Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah dana desa dan alokasi dana desa, program dana desa dan alokasi dana desa merupakan upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia.

2. Variabel Terikat (dependent variabel) (Y)

Variabel terikat adalah variabel penelitian yang diukur untuk mengetahui besarnya efek atau pengaruh variabel lain. Besarnya efek tersebut dilihat

⁸¹ Husein Umar, *Metode Riset Bisnis Panduan Mahasiswa Untuk Melakukan Riset Dilengkapi Contoh Proposal Dan Hasil Riset Bidang Manajemen Dan Akuntansi Cetakan Ke II* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 233.

⁸² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 62.

dari ada tidaknya, timbul-hilangnya, membesar-mengecilnya, atau berubahnya variasi yang tampak akibat perubahan dari variabel lain. Dalam penelitian ini variabel terikat yang digunakan yaitu kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung tahun 2015-2018.

F. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data adalah menimbang, menyaring, mengatur dan mengklarifikasikan. Menimbang dan menyaring data adalah benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan, tepat dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti. Mengatur dan mengklasifikasikan, yaitu menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.⁸³ Pada umumnya pengolahan data dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai atau relevan dengan masalah;
2. Penandaan data (*coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data, pemegang hak cipta atau urutan rumusan masalah;
3. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur berulang, sehingga mudah dipahami;
4. Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka di perlukan pengujian yaitu :

⁸³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 203.

a. Uji Asumsi Klasik

Alat yang digunakan adalah uji asumsi klasik yaitu untuk mengetahui apakah terdapat masalah di dalam data regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

Ada empat pengujian dalam uji asumsi klasik yaitu:

1) Uji Normalitas

Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak.⁸⁴ Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorof Smirnof satu arah. Dalam buku ghozali untuk mendeteksi normalitas data juga diuji dengan uji Kolmogorof Smirnof dilihat dari nilai residual yang dihasilkan diatas nilai signifikan yang ditetapkan. Dengan pengambilan keputusan:

- a) Jika Sign > 0,05 maka data berdistribusi normal
- b) Jika Sign < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.⁸⁵

2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Dan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi

⁸⁴ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Progam IBM SPSS 23*, (Semarang: Badan Penerbis Universitas Diponegoro, 2013), h. 154.

⁸⁵ Purwanto, *Statistika Untuk Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 156.

antara variabel bebas (independen), apabila terjadi korelasi antara variabel bebas maka terdapat problem multikolinieritas (multiko).⁸⁶

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi berganda terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan yang lain. Jika variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka di sebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.⁸⁷ Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi adanya atau tidaknya heteroskedastisitas dapat di ketahui dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID) dimana sumbu Y adalah Y yang telah di prediksi, dan sumbu X adalah Residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$).

4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat korelasi antara sesama variabel bebas yang diurutkan menurut waktu dan ruang. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya $(t-1)$.⁸⁸

⁸⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), h. 207.

⁸⁷ *Ibid*, h. 58.

⁸⁸ V. Wiratna Sujarweni, *Op.Cit.* h. 62.

b. Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda pada umumnya digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan linier. Pengaruh variabel independen (karena umumnya ada korelasi antara variabel independen), dalam analisis regresi berganda dapat diukur secara terpisah dan secara bersama-sama terhadap konstruk variabel.⁸⁹

Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk melihat prediksi nilai dari Dana Desa (X1) dan Alokasi Dana Desa (X2) terhadap tingkat Kemiskinan (Y) di Kecamatan Sendang Agung, sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh antara variabel independen (X1 dan X2) dengan variabel dependen (Y). Jika tidak terdapat pola yang jelas, sebaran data di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas yaitu model regresi yang homokedastisitas.

Model persamaannya adalah sebagai berikut :

Analisis regresi berganda $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$

Dimana :

Y = Kemiskinan

a = Konstanta

⁸⁹ Sofyan Siregar, *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 89.

X_1 = Dana Desa

X_2 = Alokasi Dana Desa

b_1 = Koefisien regresi Dana Desa

b_2 = Koefisien regresi Alokasi Dana Desa

e = Error term⁹⁰ Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan statistik parametrik. Oleh karena itu, setiap data konstruk variabel harus terlebih dahulu diuji normalitasnya. Statistik parametrik menurut Ghazali & Ikhsan merupakan uji yang modelnya yang menetapkan adanya syarat-syarat tertentu tentang parameter populasi yang merupakan sumber sampel penelitiannya. Syarat-syarat itu biasanya tidak diuji dan dianggap sudah dipenuhi. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan (α) 0,05 atau 5% untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau ditolak dengan cara menguji nilai F. Untuk menguji masing-masing variabel independen secara terpisah terhadap tingkat kemiskinan dilakukan dengan menguji nilai t dengan uji dua sisi pada tingkat signifikansi (α) 0,05 atau 5%. Kriteria pengujian yang digunakan adalah menerima hipotesis jika nilai t hasil perhitungan adalah positif signifikan.⁹¹

c. Uji Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara dari suatu masalah dan merupakan penuntun untuk melakukan penelitian.⁹² Apabila uji statistik

⁹⁰ *Ibid*, h.89.

⁹¹ Sri Mulyono, *Statistik Untuk Ekonomi & Bisnis Edisi Ketiga*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1990), h. 257.

⁹² Moh. Prabundu Tika, *Op. Cit.* h. 29.

berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 di tolak), pengujian tersebut bermakna signifikan. Sedangkan disebut tidak signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima.⁹³

1) Uji F Statistik

Uji F-statistik ini dilakukan untuk melihat pengaruh variable independen terhadap variabel dependen secara serentak. Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak artinya variabel dependen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Dan jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima artinya variabel Independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen. Nilai F-hitung dapat diperoleh dengan rumus :

$$F - Hitung = \frac{R^2 / k - 1}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Di mana :

R^2 =Koefisien determinasi

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah sampel

2) Uji t Statistik

Uji t-statistik merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi berganda signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan menganggap variable independen lainnya konstan. Langkah-

⁹³ Wiratna Sujarweni, Op. Cit. h. 93.

langkah yang ditempuh dalam pengujian adalah menyusun hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternative (H_a) dengan taraf nyata (α) yang biasadigunakan adalah 5% atau 0,05. Pengambilan kesimpulannya adalah dengan melihat nilai sig α (5%) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Jika sig > 0,05 maka H_0 diterima
- b) Jika sig < 0,05 maka H_0 ditolak

3) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (*goodness of fit*), yang dinotasikan dengan R^2 merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi. Determinan (R^2) Mencerminkan kemampuan variabel *dependen*. Nilai R^2 menunjukkan seberapa besar pengaruh proporsi dari total variasi variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelasnya. Semakin tinggi nilai R^2 menunjukkan seberapa besar proporsi dari total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel *dependen*.⁹⁴

⁹⁴ Juliansah Noor, *Metodelogi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 162.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Sendang Agung

a. Sejarah Singkat Berdirinya Kecamatan Sendang Agung

Kecamatan Sendang Agung merupakan salah satu wilayah kecamatan yang berada di Kabupaten Lampung Tengah, yang terletak pada $104^0-4905^0-104^0-56^0$ bujur timur dan $05^0 - 08^0 - 15^0$ Lintang Selatan. Keadaan alam Kecamatan sendang agung, terletak di ketinggian dari rata-rata 88 – 125 m permukaan laut, dengan curah hujan setiap tahun berkisar 2.435 mm, dengan suhu udara antara 23 – 32⁰ C.

Wilayah kecamatan Sendang Agung merupakan pemekaran dari wilayah Kecamatan Kalirejo. Awalnya merupakan lahan tebangan yang mulai dibuka oleh warga sejak tahun 1951. Kemudian dibentuk desa-desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 54/D/1953 tanggal 18 April 1953, kemudian berkembang lagi dengan pemekaran berikutnya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 261/I.6/DES/72 tanggal 26 Mei 1972.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/303/B.III/HK / 1990 tanggal 27 Agustus 1990 dengan surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/1433/PUOD/1990 dibentuk wilayah Perwakilan Kecamatan Kalirejo di Sendang Agung

yang diresmikan oleh Bupati KDH Lampung Tengah pada tanggal 25 februari 1991.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/593/II/HK/1993 tanggal 30 Desember 1993 ditetapkan menjadi Kecamatan Perwakilan, dan selanjutnya ditetapkan menjadi Kecamatan Pembantu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan 13 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah, diteruskan dengan Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 44 Tahun 2001 tanggal 3 Agustus 2001 tentang Persemian 13 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah, maka dibentuk Kecamatan Sendang Agung dan diresmikan oleh Bupati Lampung Tengah pada tanggal 8 Agustus 2001, dengan pusat pemerintahan berada di Kampung Sendang Agung.

Jarak Kecamatan Sendang Agung ke pusat pemerintahan Kabupaten sekitar 66 km dan jarak ke pusat pemerintahan Propinsi Lampung di Bandar Lampung adalah sekitar 77 km. Letak Geografis Kecamatan Sendang Agung, berbatasan langsung dengan :

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kec. Pubian dan Kec. Padang Ratu
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Kec. Kalirejo dan Kec. Padang Ratu

- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kec. Banyumas (Kab. Pringsewu) dan Kawasan Register 22 Way Waya
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Kawasan Register 22 Way Waya
- Semenjak dibentuk Perwakilan wilayah Kecamatan kalirejo di Sendang Agung tahun 1991 sampai dengan sekarang, Kecamatan Sendang Agung, telah dipimpin oleh 12 orang Camat, yaitu :

Tabel 4.1
Data Nama Camat

No	Nama Camat	Periode
1	Drs. Hidayatullah	1990 – 1993
2	Drs. Nono Maryono	1993 – 1995
3	Drs. Tri Sambodo	1995 – 1996
4	Ahmad Nazali, BA	1996 – 1997
5	Ansyori, BA	1997 – 1998
6	Rizal Effendi, S.IP.	1998 – 2004
7	Adi Sriono, S.Sos.	2004 – 2006
8	Rasmin, SE.	2006 – 2010
9	Ahmad Nizar, S.IP., MA	2010 – 2014
10	Suharno, S.Sos	2014 – 2016
11	Pur Sulistiyono, S.STP., M.Si	2016 – 2019
12	Agus Suratno, S.IP., MM.	2019 - sekarang

Sumber : Data Publikasi Kecamatan Sendang Agung Tahun 2019

b. Kondisi Demografis Kecamatan Sendang Agung

1) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kecamatan Sendang Agung terdiri dari 40.625 (empat puluh ribu enam ratus dua puluh lima) jiwa, dengan jumlah laki-laki 19.907 (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh)

jiwa dan perempuan 20.718 (dua puluh ribu tujuh ratus delapan belas) jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini :

Tabel 4.2
Data Jumlah Penduduk

No	Kampung	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sendang Mulyo	3.425	3.360	6.785
2	Sendang Rejo	2.728	2.717	5.445
3	Sendang Baru	1.839	1.807	3.646
4	Sendang Retno	1.413	1.366	2.779
5	Sendang Asih	2.535	2.819	5.354
6	Sendang Agung	3.578	3.771	7.349
7	Sendang Asri	1.526	1.533	3.059
8	Sendang Mukti	1.710	1.824	3.534
9	Kutowinangun	1.153	1.521	2.674
	Jumlah	19.907	20.718	40.625

Sumber : Data Publikasi Kecamatan Sendang Agung Tahun 2019

2) Lembaga Pendidikan

Kecamatan Sendang Agung memiliki lembaga pendidikan sebanyak 76 yang terdiri dari PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, TPA dan Pondok Pesantren pun aktif di Kecamatan Sendang Agung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini :

Tabel 4.3
Lembaga Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	23
2	SD Negeri	24
3	SD Swasta / Madrasah Ibtidaiyah	10
4	SMP Negeri	2
5	SMP Swasta / Madrasah Tsanawiyah	8
6	SMA Negeri	1
7	SMA Swasta / Madrasah Aliyah	5
8	Pondok Pesantren	3
	Jumlah	76

3) Luas Desa, Jumlah Dusun dan Jumlah RT

Kecamatan Sendang Agung memiliki luas wilayah dengan total 6.033 hektar, jumlah dusun ada 69 dan jumlah RT sebanyak 165. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini :

Tabel 4.4
Data Luas Desa, Dusun dan RT

No	Kampung	Luas (dalam ha)	Jumlah Dusun	Jumlah RT
1	Sendang Mulyo	1.130	8	30
2	Sendang Rejo	750	9	25
3	Sendang Baru	529	5	17
4	Sendang Retno	499	5	12
5	Sendang Asih	826	9	18
6	Sendang Agung	956	8	26
7	Sendang Asri	489	6	13
8	Sendang Mukti	548	7	14
9	Kutowinangun	306	5	10
	Jumlah	6.033	69	165

c. Anggaran Dana Desa Kecamatan Sendang Agung

Kecamatan Sendang Agung telah menerima dana desa sejak tahun 2015 hingga sekarang, total anggaran dana desa mencapai 1 miliar untuk setiap desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini :

Tabel 4.5
Dana Desa Kecamatan Sendang Agung
Tahun 2015-2018
(dalam rupiah)

No	Desa	2015	2016	2017	2018
1	Sendang Mulyo	465015609	636341047	801343395	923258553
2	Sendang Rejo	467334964	641614967	817049558	885267062
3	Sendang Baru	450378318	644645307	820902851	956268076
4	Sendang Retno	418139528	619160406	788496992	749959115
5	Sendang Asih	437553104	638694985	813336594	813754798
6	Sendang Agung	462612275	663128091	844405020	900601452
7	Sendang Asri	418097692	619459055	788876745	741723700
8	Sendang Mukti	414967601	615837232	784271341	768915585
9	Kuto Winangun	416386614	615451528	783780890	788957692
	Jumlah	3.950.485.700	5.694.332.622	7.251.463.386	7.528.706.033

Sumber : Data Publikasi Kecamatan Sendang Agung Tahun 2019

d. Anggaran Alokasi Dana Desa Kecamatan Sendang Agung

Alokasi dana desa di Kecamatan Sendang Agung dari tahun ke tahun selalu meningkat, pada tahun 2015 total alokasi dana desa mencapai Rp 1.173.081.579 dan dua tahun kemudian di tahun 2015 total

anggaran alokasi dana desa meningkat hingga total Rp 3.598.886.772.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini :

Tabel 4.6
Jumlah Alokasi Dana Desa Kecamatan Sendang Agung
Tahun 2015-2018
(dalam rupiah)

No	Desa	2015	2016	2017	2018
1	Sendang Mulyo	149813026	177394648	462636666	456319360
2	Sendang Rejo	157349971	182657290	470765670	373688612
3	Sendang Baru	108884037	137901970	408661046	481260800
4	Sendang Retno	103559317	126890564	368794644	343275532
5	Sendang Asih	148456394	166711587	441038386	417860000
6	Sendang Agung	163831036	183681576	493727780	467097248
7	Sendang Asri	117497659	132239044	373747909	351680000
8	Sendang Mukti	119814013	139115974	379768690	361260900
9	Kuto Winangun	103279113	121301569	354022092	346444320
	Jumlah	1.173.081.579	1.367.894.222	3.753.162.881	3.598.886.772

Sumber : Data Publikasi Kecamatan Sendang Agung Tahun 2019

e. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di berbagai desa di Kecamatan Sendang Agung, data yang di ambil dari Badan Pusat Statistik Lampung Tengah menunjukkan jumlah keluarga miskin dari tahun 2015 s.d 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah ini :

Tabel 4.7
Jumlah Keluarga Miskin Kecamatan Sendang Agung
Tahun 2015-2018

No.	Desa/Kampung	2015	2016	2017	2018
1.	Kutowinangun	200	209	222	246
2.	Sendang Agung	593	521	635	502
3.	Sendang Asih	484	434	512	436
4.	Sendang Asri	260	243	276	220
5.	Sendang Baru	407	417	462	355
6.	Sendang Mukti	240	226	264	235
7.	Sendang Mulyo	465	427	495	534
8.	Sendang Rejo	493	512	528	559
9.	Sendang Retno	240	235	264	175
	Kecamatan SendangAgung	3.282	3.227	3.658	3.262

Sumber: BPS Lampung Tengah, Jumlah Keluarga Miskin Kecamatan Sendang Agung 2019

B. Hasil Analisis Data

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi data dengan normal. Keputusan terdistribusi normal tidaknya residual secara sederhana apabila Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi dengan normal dan sebaliknya, apabila nilainya lebih kecil maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual terdistribusi dengan normal. Hasil analisis terhadap asumsi normalitas dengan *one sample kolmogorov smirnov* dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.34972148
	Absolute	.160
Most Extreme Differences	Positive	.117
	Negative	-.160
Kolmogorov-Smirnov Z		.962
Asymp. Sig. (2-tailed)		.313

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Output SPSS (data diolah pada tahun 2019)

Dari output diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikan (Asymp. Sig. 2-tailed) sebesar 0,313. Karena signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi dengan normal.

b. Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat terdapat gangguan atau tidak terhadap data di mana multikolinearitas terjadi apabila ada korelasi antar variabel independen. Dengan demikian uji ini dilakukan agar data yang ada harus terbebas dari gangguan multikolinearitas dapat dilihat pada tabel kolom variance inflation factor (VIF) dan tolerance. Adapun hasil dari pengolahan data adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	11.031	5.272		2.092	.044		
Dana Desa	.499	.179	.705	2.781	.009	.381	2.628
Alokasi Dana Desa	-.726	.371	-.496	-1.956	.059	.381	2.628

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber: Output SPSS (data diolah pada tahun 2019)

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel coefisien (nilai tolerance dan VIF). Dari output diatas dapat diketahui bahwa nilai VIF berkisaran dari 10 dan nilai tolerance berkisaran 0,1 untuk kedua variabel / nilai tolerance kurang dari 1 dan nilai VIF lebih dari 1.

Berdasarkan hasil uji multikolineritas di atas menunjukkan bahwa nilai VIF variabel X1 sebesar 2,628. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi masalah multikolinearitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat korelasi antara sesama variabel bebas yang diurutkan menurut waktu dan ruang. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ($t-1$). Untuk mengetahui terdapat atau tidaknya masalah autokorelasi dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.10
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.439 ^a	.193	.144	.36016	2.193

a. Predictors: (Constant), Alokasi Dana Desa, Dana Desa

b. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber: Output SPSS (data diolah pada tahun 2019)

Nilai durbin waston dapat dilihat pada tabel diatas (kolom durbin waston). Nilai durbin waston sebesar 2.193, sedangkan dari tabel dw dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data $n=36$ serta $k=2$. Diperoleh nilai dl sebesar 1.3537 dan du sebesar 1.5872. Karena nilai dw 2,193 berada pada daerah lebih dari ($>$) dl, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji glejser yaitu dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikan antara variabel independen dengan absolut residual $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas yang telah dilakukan:

Tabel 4.11
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.603	2.183		1.650	.108
Dana Desa	.056	.074	.206	.755	.456
Alokasi Dana Desa	-.215	.154	-.382	-1.400	.171

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Output SPSS (data diolah pada tahun 2019)

Dari output diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk dana desa sebesar 0,456 dan alokasi dana desa sebesar 0.171 karena signifikansi lebih dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak ada masalah heteroskedastisitas.

2. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Pada penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda. Regresi berganda berguna untuk du variabel predictor atau lebih terhadap

satu variabel kriterium atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan yang fungsional antara dua variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y). analisis regresi berganda pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dana desa dan alokasi dana desa tahun 2015-2018 di Kecamatan Sendang Agung. Adapun formulasi persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Hasil regresi berganda pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12
Hasil regresi linier berganda

Model	Coefficients ^a			T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11.031	5.272		2.092	.044
Dana Desa	.499	.179	.705	2.781	.009
Alokasi Dana Desa	-.726	.371	-.496	-1.956	.059

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber: Output SPSS (data diolah pada tahun 2019)

Berdasarkan tabel 4.12 diatas formula yang didapat dari hasil uji regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = 11,031 + 0,499 - 0,726 + e$$

Dimana

a = Konstanta

= 11,031

X_1 = Dana Desa

$b_1 = 0,499$

X_2 = Alokasi Dana Desa

$b_2 = -0,726$

Koefisien-koefisien persamaan regresi linier berganda diatas dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan persamaan regresi linier berganda. Nilai konstanta mempunyai yaitu sebesar 11,031 pada persamaan regresi menunjukan apabila variable independen nilainya 0, maka variabel kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 11,031%.
- b. Koefisien regresi X_1 (dana desa) sebesar 0,499 artinya jika dana desa mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka tingkat kemiskinan (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,499. Koefisien bernilai positif antara dana desa dengan tingkat kemiskinan. Jika dana desa meningkat maka tingkat kemiskinan akan semakin tinggi pula.
- c. Koefisien regresi X_2 (alokasi dana desa) sebesar -0,726 artinya jika alokasi dana desa mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka tingkat kemiskinan (Y) akan meningkat sebesar -0,726. Koefisien bernilai negatif berarti terjadi hubungan yang tidak positif antara alokasi dana desa dengan tingkat kemiskinan yang menyatakan bahwa apabila variabel alokasi dana desa semakin tinggi maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan.

3. Hasil Uji Hipotesis

a. Uji Signifikan Parsial (Uji T)

Uji t dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen (dana desa dan alokasi dana desa) secara individual dalam menerangkan variabel dependen (kemiskinan). Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi adalah sebesar 0,05.⁹⁵ Keputusan penerimaan hipotesis atau penolakannya adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 , H_2 ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini membuktikan bahwa secara parsial variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 , H_2 diterima (koefisien regresi signifikan). Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

⁹⁵ Imam Ghazali III, *Aplikasi analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2013),h. 98

Tabel 4.13
Hasil Uji T

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11.031	5.272		2.092	.044
Dana Desa	.499	.179	.705	2.781	.009
Alokasi Dana Desa	-.726	.371	-.496	-1.956	.059

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber: Output SPSS (data diolah pada tahun 2019)

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada tabel diperoleh:

a) Variabel dana desa (X1)

Variabel dana desa (X1) mempunyai t hitung yakni 2.781 dan nilai signifikansi sebesar 0,009. Ketentuan pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansinya. Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan taraf kepercayaan variabel dana desa (X1) 95% memiliki pengaruh terhadap variabel kemiskinan (Y). Hal ini berarti semakin tinggi atau rendahnya jumlah dana desa maka akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan.

b) Variabel alokasi dana desa (X2)

Variabel alokasi dana desa (X1) mempunyai t hitung yakni -1.956 dan nilai signifikansi sebesar 0,059. Ketentuan pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya

nilai signifikansinya. Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,059 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak. Secara parsial memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan taraf kepercayaan variabel alokasi dana desa (X_1) 95% tidak memiliki pengaruh terhadap variabel kemiskinan (Y). Hal ini berarti semakin tinggi atau rendahnya jumlah alokasi dana desa maka tidak akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan.

b. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F merupakan suatu pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.⁹⁶

Kriterianya adalah:

- 1) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_3 diterima.
- 2) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_3 ditolak.

Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_3 diterima yang artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

⁹⁶ Juliansah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi dan Karya Ilmiah (Jakarta: Kencana, 2011), h. 162.

Tabel 4.14
Hasil uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1.022	2	.511	3.938	.029 ^b
Residual	4.281	33	.130		
Total	5.302	35			

a. Dependent Variable: Kemiskinan

b. Predictors: (Constant), Alokasi Dana Desa, Dana Desa

Sumber: Output SPSS (data diolah pada tahun 2019)

Adapun hasil dalam pengujian ini dapat dilihat pada tabel 4.13 diatas. Sebelum menyimpulkan hipotesis yang diterima atau ditolak, terlebih dahulu menentukan F tabel dengan signifikan 5% = 0,05 (uji 2 sisi) dan derajat kebebasan df1 (N1) = jumlah variabel (variabel bebas + terikat)-1 atau 3-1 =2 sedangkan df2 (N2) = n-k (variabel bebas)-1 atau 36-2-1=33. Hasil diperoleh F tabel sebesar 3,28.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada tabel 4.14 diperoleh F hitung yakni 3.938 dan nilai signifikan sebesar 0,029. Hasil penelitian diperoleh nilai F hitung $3.938 > 3,28$ dan nilai signifikan sebesar $0,029 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima yang artinya variabel independen (dana desa dana alokasi dana desa) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (kemiskinan). Maka dengan kata lain variabel-variabel independen memiliki taraf kepercayaan 95% mampu menjelaskan besarnya variabel dependen yaitu variabel kemiskinan.

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Koefisien determinasi yaitu untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen (dana desa dan alokasi dana desa) terhadap variabel dependen (kemiskinan). Adapun hasil perhitungannya adalah:

Tabel 4.15
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.439 ^a	.193	.144	.36016

a. Predictors: (Constant), Alokasi Dana Desa, Dana Desa

Sumber: Output SPSS (data diolah pada tahun 2019)

Berdasarkan tabel 4.15 dapat diketahui hasil uji koefisien determinasi pada output model summary dari analisis regresi berganda tepatnya kolom R Square sebesar 0,193. Jadi pengaruh dana desa dana alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan yaitu sebesar 19,3% sedangkan sisanya 80,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Secara Parsial Jumlah Dana Desa dan Jumlah Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Sendang Agung Tahun 2015-2018

Pengaruh secara parsial merupakan pengaruh variabel independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependen, yaitu untuk melihat pengaruh variabel jumlah dana desa dan jumlah alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung tahun 2015-2018, akan diuraikan sebagai berikut:

a. Pengaruh Jumlah Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Sendang Agung Tahun 2015-2018

Pembahasan pengaruh jumlah dana desa terhadap tingkat kemiskinan di kecamatan Sendang Agung dari tahun 2015 hingga 2018 yang diolah menggunakan program SPSS 21 menunjukkan bahwa angka koefisien regresi X_1 (dana desa) sebesar 0,499 artinya jika jumlah dana desa mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka tingkat kemiskinan (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,499. Koefisien bernilai positif berarti terjadi hubungan antara dana desa dengan tingkat kemiskinan. Jika jumlah dana desa meningkat maka tingkat kemiskinan akan semakin tinggi pula.

Adapun secara parsial diketahui untuk variabel dana desa (X_1) mempunyai t hitung yakni 2.781 dan nilai signifikan sebesar 0,009. Keputusan pengambilan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan

pada besarnya nilai signifikansinya. Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan taraf kepercayaan variabel dana desa (X_1) 95% memiliki pengaruh terhadap variabel kemiskinan (Y). Hal ini berarti semakin tinggi atau rendahnya jumlah dana desa maka akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan. Hasil penelitian diatas mengindikasikan bahwa dana desa telah berjalan sesuai dengan tujuan.

Pelaksanaan program dana desa di Kecamatan Sendang Agung sudah dijalankan sesuai prioritas penggunaan dana desa dalam bidang pembangunan desa yaitu untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan. sebagian besar dana desa tersebut digunakan untuk pembangunan desa melalui program padat karya yaitu seperti membangun infrastruktur desa, karena padat karya akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat desa, sebab pembangunan infrastruktur desa akan memberdayakan sumber daya manusia lokal desa, sumber daya alam masing-masing desa, menggunakan bahan-bahan baku dari desa, sehingga dana desa berputar secara berkelanjutan di wilayah desa dan manfaat dana desa pun bisa dirasakan semua masyarakat di Kecamatan Sendang Agung.

Penetapan prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa melalui program padat karya yaitu untuk pembangunan,

pengembangan dan pemeliharaan. Seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, drainase, irigasi, gorong-gorong, pembuatan sumur bor, pemeliharaan kantor desa, pembangunan PAUD, pembangunan gapura atau batas desa dan lain sebagainya. Total jumlah persentase yang di alokasikan untuk bidang pembangunan desa berkisar antara 60% hingga 80% dalam setiap tahunnya di setiap desa. Jumlah tersebut sangat besar sehingga program padat karya juga menghasilkan pengaruh yang cukup besar terhadap kesejahteraan masyarakat desa sehingga dahmpaknya bisa mengurangi jumlah pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung.

Berdasarkan analisis diatas hasil penelitian ini sudah sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dalam penelitian Handra Hefrizal dkk, pada tahun 2017 yang meneliti pengaruh dana desa dan penanggulangan kemiskinan, menyatakan bahwa dana desa mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan desa. Tujuan program dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan sarana dan prasarana desa, pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang keseluruhan melibatkan

penduduk desa, baik penduduk miskin maupun bukan penduduk miskin dalam pelaksanaannya.⁹⁷

Dalam wawancara yang dilakukan kepada Sekretaris Camat Kecamatan Sendang Agung yaitu Bapak Fajar Wahyudi mengatakan berbeda pendapat yakni:

”sebenarnya tujuan dari pada adanya dana desa yaitu untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa agar bisa mensejahterakan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan karena jumlahnya sangat besar bahkan mencapai 1 miliar setiap tahun, tetapi hasil dilapangan terlihat bahwa penggunaan dana desa hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur saja, sedangkan dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan potensi ekonomi lokal atau kegiatan ekonomi kreatif masih terbilang sangat kecil, padahal banyak desa yang mempunyai potensi dan kegiatan ekonomi kreatif desa yang dapat didorong agar menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat desa. Seperti pembuatan keripik, budidaya ikan tawar, pembuatan batu bata bolong, pembuatan genteng, dan membuat desa wisata karna di desa ini masih sangat asri terutama yang berdekatan dengan pegunungan. Namun potensi ini terkendala oleh permodalan dan pemasaran, dan pemerintah kurang memperhatikan masalah itu. Meskipun kegiatan bersifat pembangunan fisik masih wajar, karena memang masih butuh, dan pemerintah desa masih terbiasa melakukan kegiatan fisik karena administrasinya lebih mudah. Kurangnya perencanaan yang matang dan pendampingan juga menjadi masalah dalam pemakaian dana desa di Kecamatan Sendang Agung”.⁹⁸

Dalam wawancara dengan Bapak Saroji salah seorang warga di desa Sendang Agung, beliau mengatakan hal yang sama, dimana penggunaan dana desa di Kecamatan Sendang Agung hanya digunakan untuk membangun infrastruktur, sedangkan untuk yang bersifat

⁹⁷ Hefrizal, Hendra, et. al. “Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan”. *Kompak*, Februari 2017, h. 14-15.

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Sekretaris Camat Kecamatan Sendang Agung Bapak Fajar Wahyudi pada 14 Mei 2019.

pemberdayaan masyarakat seperti pengembangan potensi ekonomi lokal masih terbilang sangat minim.

“Penggunaan dana desa di Kecamatan Sendang Agung terlihat hanya untuk pembangunan fisik saja, seharusnya pemerintah desa juga harus mengalokasikan dana desa tersebut ke bidang pemberdayaan masyarakat yang bersifat mengembangkan potensi-potensi ekonomi agar bisa menjadi sumber pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, padahal banyak desa yang mempunyai potensi ekonomi yang bagus, namun potensi ini terkendala oleh permodalan, pemasaran dan pengetahuan masyarakat tentang pengembangan kegiatan ekonomi. dan pemerintah kurang memperhatikan masalah itu.”⁹⁹

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dana desa sudah berjalan sesuai tujuan dari peraturan pemerintah yaitu meningkatkan pembangunan desa melalui program padat karya seperti membangun infrastruktur desa, program padat karya akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa sebab pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa akan memberdayakan sumber daya manusia lokal desa dan sumber daya alam desa sehingga dana desa berputar secara berkelanjutan di wilayah desa dan manfaat dana desa pun bisa dirasakan semua masyarakat sehingga bisa mengurangi jumlah pengangguran dan mengurangi masalah kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung.

Program padat karya dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa bersifat produktif yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya lokal, tenaga kerja lokal, dan teknologi lokal untuk menambah

⁹⁹ Hasil Wawancara Dengan Warga Di Kecamatan Sendang Agung Bapak Saroji Pada 16 Juni 2019.

pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengaturan desa melalui program padat karya yang dilakukan pemerintah desa bertujuan untuk memajukan perekonomian masyarakat desa, mengatasi kesenjangan pembangunan serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan.

Pelaksanaan program padat karya yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui pembangunan infrastruktur desa telah banyak memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, sehingga terjadi pemerataan ekonomi ke pedesaan sekaligus untuk mengatasi kesenjangan. Program padat karya antara lain mencakup program percepatan peningkatan dan pengembangan infrastruktur sosial dan ekonomi wilayah.

Menurut pendapat masyarakat tentang dana desa yaitu belum efektif menurunkan angka kemiskinan, hal ini disebabkan oleh penggunaan dana desa hanya berfokus pada pembangunan fisik, sedangkan dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kesejahteraan dan menanggulangi kemiskinan masih terbilang kecil, padahal banyak desa yang mempunyai kegiatan ekonomi desa yang dapat didorong untuk menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat, seperti budidaya ikan tawar, pembuatan batu bata bolong, pembuatan genteng dan membuat desa wisata.

Prioritas penggunaan dana desa selain untuk membangun infrastruktur desa juga digunakan untuk pemberdayaan masyarakat yang bersifat mengembangkan potensi ekonomi lokal, potensi ekonomi lokal tersebut akan menggerakkan ekonomi desa sekaligus juga akan banyak membuka lapangan pekerjaan, menurunkan angka pengangguran serta mengurangi angka kemiskinan jika dikelola dengan baik. akan tetapi pemerintah desa belum maksimal dalam pengelolaan dana desa untuk mengembangkan potensi ekonomi desa. Hal ini di sebabkan oleh kurangnya pengawasan pemerintah terkait penggunaan dana desa tersebut.

Selama ini penggunaan dana desa menurut masyarakat belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran. Supaya dana desa bisa maksimal dan tepat sasaran, maka pemerintah desa harus mengenali, memetakan dan menginventarisir apa saja potensi ekonomi desa sesuai dengan sumberdaya yang ada di desa, selanjutnya dilakukan musyawarah desa untuk memutuskan apa saja usaha produktif yang diprioritaskan untuk dibiayai dana desa. Dengan demikian manfaat dari dana desa tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat desa, dan tujuan dari program dana desa dalam menekan angka kemiskinan dapat tercapai.

b. Pengaruh Jumlah Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat

Kemiskinan Di Kecamatan Sendang Agung Tahun 2015-2018

Pembahasan pengaruh jumlah alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan di kecamatan Sendang Agung dari tahun 2015 hingga 2018 yang diolah menggunakan program SPSS 21 menunjukkan bahwa angka koefisien regresi X_2 (alokasi dana desa) sebesar -0,726 artinya jika alokasi dana desa mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka tingkat kemiskinan (Y) akan meningkat sebesar -0,726. Koefisien bernilai negatif berarti terjadi hubungan yang tidak positif antara jumlah alokasi dana desa dengan tingkat kemiskinan. Jika jumlah alokasi dana desa meningkat maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan.

Adapun secara parsial diketahui untuk variabel alokasi dana desa (X_2) mempunyai t hitung yakni -1,956 dan nilai signifikan sebesar 0,059. Keputusan pengambilan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansinya. Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,059 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_2 ditolak. Secara parsial memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan taraf kepercayaan variabel alokasi dana desa (X_2) 95% tidak memiliki pengaruh terhadap variabel kemiskinan (Y). Hal ini berarti semakin tinggi atau rendahnya jumlah alokasi dana desa maka tidak akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan.

Hasil analisis diatas menunjukkan bahwa cara pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui kebijakan alokasi dana desa yang digelontorkan pemerintah belum menunjukkan hasil yang maksimal, hal ini disebabkan oleh minimnya jumlah anggaran alokasi dana desa. Untuk setiap desa dari tahun 2015 sampai 2018 berkisar antara Rp 100.000.000 sampai dengan Rp 450.000.000 per tahun dan penggunaan alokasi dana desa tersebut hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur saja seperti jalan, drainase, pembuatan gapura atau batas desa, irigasi dan renovasi kantor desa. sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kesejahteraan dan menanggulangi kemiskinan seperti optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum terlihat atau masih sangat minim.

Selanjutnya jumlah alokasi dana desa di Kecamatan Sendang Agung yang dianggarkan untuk bidang pembangunan jumlahnya sama dengan dana desa yaitu berkisar antara 60% hingga 80% setiap tahunnya di setiap desa. Dan anggaran untuk bidang pemberdayaan masyarakat hanya berkisar antara 5% hingga 10% setiap tahunnya, jumlah ini terbilang sangat kecil karna tidak sebanding dengan bidang pembangunan, dan jumlah alokasi dana desa yang sangat kecil. Pemerintah desa dianggap tidak mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, seharusnya dana desa dianggarkan untuk hal yang

lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.

Berdasarkan analisis diatas hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 dalam penelitian Budi Prihartini Astuti pada 2012 yang meneliti pengaruh alokasi dana desa terhadap kemiskinan, menyatakan bahwa alokasi dana desa mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan desa. Tujuan alokasi dana desa adalah menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, yang dalam pelaksanaannya melibatkan penduduk desa, baik penduduk miskin maupun bukan penduduk miskin.¹⁰⁰

Hasil penelitian ini juga tidak relevan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Azwardi & Sukanto, penelitian yang dilakukan pada tahun 2014, dengan judul “Efektivitas alokasi dana desa dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan”. Merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan analisis inferensial dalam bentuk data time series dengan menggunakan alat analisis regresi sederhana.

¹⁰⁰ *Ibid*, h. 516.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh negative antara alokasi dana desa terhadap kemiskinan, demikian juga dengan hasil simulasi ADD minimal 10% terhadap kemiskinan menunjukkan hubungan negatif pula.

Dalam wawancara yang dilakukan kepada Sekretaris Camat Kecamatan Sendang Agung yaitu Bapak Fajar Wahyudi mengatakan bahwa :

”sebenarnya alokasi dana desa dan dana desa tidak berbeda jauh, bahkan hampir sama dalam tujuan dan prioritas penggunaan, yang membedakan hanya sumber dari kedua kebijakan tersebut di dapatkan. Terkait seberapa pengaruh kedua program tersebut terhadap jumlah keluarga miskin di Kecamatan Sendang Agung memang terbilang kecil pengaruhnya, karna kedua kebijakan tersebut sama-sama memprioritaskan dananya hanya untuk pembangunan infrastruktur atau fisik saja, sedangkan untuk untuk bidang pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan potensi ekonomi lokal belum terlihat. Meskipun kegiatan bersifat pembangunan fisik masih wajar, karena masih butuh, dan pemerintah desa masih terbiasa melakukan kegiatan fisik karena administrasinya lebih mudah. Kurangnya perencanaan yang matang dan pendampingan juga menjadi masalah dalam pemakaian dana tersebut di Kecamatan Sendang Agung”.¹⁰¹

Dalam wawancara dengan Bapak Rasyid salah seorang warga di desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung, beliau mengatakan hal yang sama, dimana alokasi dana desa dan dana desa yaitu sama dalam penggunaannya, hanya digunakan untuk membangun infrastruktur, sedangkan untuk kegiatan masyarakat yang bersifat mengembangkan perekonomian masih terbilang sangat minim.

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Sekretaris Camat Kecamatan Sendang Agung Bapak Fajar Wahyudi pada 14 Mei 2019.

“alokasi dana desa dan dana desa itu sama saja dari pemerintah, dimana penggunaannya hanya memprioritaskan dananya untuk pembangunan infrastruktur atau fisik saja, sedangkan untuk kegiatan masyarakat yang bersifat mengembangkan perekonomian masih terbilang sangat minim, padahal lebih penting digunakan untuk mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang ada di desa agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Sendang Agung.”¹⁰²

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program alokasi dana desa belum berjalan sesuai peraturan pemerintah, karena belum bisa menurunkan angka kemiskinan meskipun jumlah kemiskinan masih fluktuatif turun. Hal ini juga sesuai anggapan masyarakat bahwa kebijakan ini masih sama dengan kebijakan dana desa yaitu hanya memprioritaskan dananya untuk pembangunan infrastruktur, sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan potensi ekonomi lokal masih sangat minim.

Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengawasan dari pemerintah desa maupun kabupaten juga menjadi penyebab belum maksimalnya penggunaan alokasi dana desa di Kecamatan Sendang Agung. Sebab, kualitas SDM yang rendah menjadi kelemahan atau hambatan dalam pengelolaan dan penyaluran alokasi dana desa. Kemudian, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan

¹⁰² Hasil Wawancara Dengan Warga Di Kecamatan Sendang Agung Bapak Rasyid Pada 19 Mei 2019.

pemerintah di atasnya yaitu kabupaten, karena alokasi dana desa yang bersumber dari APBD jumlahnya cukup besar.

Masyarakat diharapkan dapat mengawasi berjalannya program ini dan diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan alokasi dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian pemerintah pusat atau kementerian terkait untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di tingkat desa, terutama melalui peningkatan kompetensi aparat desa dan inspektorat daerah.

2. Pengaruh Secara Simultan Jumlah Dana Desa dan Jumlah Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Sendang Agung Tahun 2015-2018

Hasil penelitian diperoleh nilai F hitung yakni 3.938 dan nilai signifikan sebesar 0,029. Hasil penelitian diperoleh nilai F hitung $3.938 > 3,28$ dan nilai signifikan sebesar $0,029 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima yang artinya variabel independen (dana desa dan alokasi dana desa) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (kemiskinan). Maka dengan kata lain variabel-variabel independen memiliki taraf kepercayaan 95% mampu menjelaskan besarnya variabel dependen yaitu variabel kemiskinan.

Sedangkan, dari hasil analisis menunjukkan bahwa hasil uji koefisien determinasi (R^2) pada output model summary dari analisis

regresi berganda tepatnya kolom R Square sebesar 0,193. Jadi pengaruh dana desa dana alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan yaitu sebesar 19,3% sedangkan sisanya 80,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian.

Berdasarkan analisis diatas berarti variabel dana desa dan alokasi dana desa secara bersama-sama berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di kecamatan Sendang Agung tahun 2015-2018. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 19 bahwa secara garis besar tujuan dari kebijakan dana desa dan alokasi dana desa adalah menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.¹⁰³

Dari data yang telah dikumpulkan oleh penulis diketahui bahwa besaran jumlah dana desa di Kecamatan Sendang Agung selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, pada tahun 2015 jumlah dana desa adalah sebesar Rp 3.950.485.779, tahun 2016 sebesar Rp 5.694.332.622, tahun 2017 sebesar Rp 7.251.463.386, dan kemudian pada tahun 2018 sebesar Rp 7.528.706.033, dana desa tersebut sebagian besar digunakan untuk pembangunan desa. Sedangkan untuk besaran jumlah alokasi dana desa juga selalu mengalami kenaikan, pada tahun 2015 sebesar sebesar Rp

¹⁰³ *Ibid*, h. 516.

1.173.081.579, tahun 2016 sebesar Rp 1.367.894.222, tahun 2017 sebesar Rp 3.753.162.881, dan pada tahun 2018 sebesar Rp 3.598.886.772,.

Seiring dengan besarnya jumlah dana desa dan alokasi dana desa juga telah berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung meskipun angkanya masih fluktuatif turun. Berdasarkan data yang telah diambil dari BPS Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2015 jumlah keluarga miskin mencapai 3.282 jiwa, selanjutnya pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 3.227 jiwa, pada tahun 2017 naik menjadi 3.658 dan kemudian pada tahun 2018 mencapai angka terendah selama kurun waktu 4 tahun terakhir yaitu sebesar 3.262 jiwa.

Jumlah anggaran dana desa dan alokasi dana desa sangatlah besar, maka keduanya mempunyai potensi besar untuk mengentaskan kemiskinan sesuai dengan tujuannya yaitu menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Nilam Indah Susilowati dkk, pada tahun 2017 yang meneliti pengaruh alokasi dana desa, dana desa, belanja modal dan produk domestik regional bruto terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa alokasi dana desa, dana desa, belanja modal dan produk domestik regional bruto secara bersama-sama berpengaruh terhadap angka kemiskinan.

Dana desa dan alokasi dana desa di Kecamatan Sendang Agung telah mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintahan desa dan masyarakat desa. Pemerintah

provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat desa agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa dan alokasi dana desa yang diterimanya. Sehingga diperlukan adanya kerja sama yang saling mendukung, pada akhirnya terciptanya pemerataan pembangunan, khususnya di pedesaan akan lebih meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pedesaan, mendorong keterlibatan aktif pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pembangunan desa di Kecamatan Sendang Agung.

3. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Sendang Agung Tahun 2015-2018

Kebijakan ekonomi adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Seperti kebijakan pemerintah untuk kepentingan publik misalnya, meliputi semua kebijakan yang berasal dari pemerintah, begitu juga dengan kebijakan sosial merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan. Kebijakan ekonomi yang masuk kedalam kebijakan sosial, sangat terkait dengan kebijakan pemerintah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi.....*, h. 53.

Islam memandang pemerintah adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat, pemerintah berkewajiban melindungi fakir miskin yang berada di daerah kekuasaannya dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan hidup mereka. Ekonomi islam memiliki komitmen yang kuat untuk memerangi masalah kemiskinan yang membelenggu umat-umat-Nya, islam menilai kemiskinan sebagai bencana dan musibah yang harus ditanggulangi, diantara cara yang ditetapkan oleh islam dalam menanggulangi kemiskinan adalah himbauan bekerja dan sederhana dalam pembelanjaan.¹⁰⁵ Program pengentasan kemiskinan bukan hanya sekedar meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin saja, melainkan untuk menjaga stabilitas kehidupan rumah tangga miskin terhadap kebutuhan pokok dari amukan krisis ekonomi yang melanda masyarakat. Berbagai cara telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi masalah kemiskinan, diantaranya adalah kebijakan dana desa dan alokasi dana desa yang dilakukan sejak tahun 2015.

Adanya pembangunan infrastruktur dalam Islam memiliki dampak yang positif dan kemaslahatan dalam segi ekonomi maupun sosial. Pembangunan infrastruktur desa yang berdampak pada perekonomian masyarakat desa baik dalam segi melakukan pekerjaan dapat meningkatkan mobilitas menjadi lancar. Dalam Ekonomi Islam motif dalam aktifitas ekonomi inilah yang kemudian mempengaruhi segala perilaku aktifitas dalam melakukan interaksi ekonomi lainnya.

¹⁰⁵ Bayu Tri Cahya “*Kemiskinan Ditinjau Dari Al-Qur'an Dan Hadist*”. Jurnal Penelitian, Vol 9, No. 1, Februari 2015 h. 55.

Paradigma islam dalam mengentaskan kemiskinan dan agar terwujudnya kesejahteraan, program pengentasan kemiskinan haruslah berlandaskan pada keadilan, tanggung jawab, kebaikan dan jauh dari segala kedzoliman dan arogansi. Dalam implementasinya dana desa dan alokasi dana desa dalam mengentaskan kemiskinan dilihat dari sudut pandang nilai-nilai dasar Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

- a. Keadilan, Islam mengajarkan agar keadilan dapat dilakukan dalam setiap waktu dan kesempatan. Tegaknya keadilan akan melahirkan konsekwensi logis berupa tercipta sebuah tatanan masyarakat yang harmonis. Tidak terbatas dalam satu aspek kehidupan, keadilan sejatinya ada dalam aspek yang amat luas, sebut saja misalnya aspek religi, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, aspek budaya, aspek hukum dan sebagainya. Sebaliknya, lunturnya prinsip keadilan berakibat pada guncangnya sebuah tatanan sosial (*social unrest*).¹⁰⁶

Keadilan yaitu dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran. Pada tataran sosiologis, keadilan berarti bahwa setiap orang harus diperlakukan sebagaimana mestinya, tanpa tekanan yang tidak wajar atau diskriminasi, sehingga ia mencakup persamaan serta rasa proporsional dan keseimbangan. Keseimbangan merupakan dimensi horisontal dari islam yang dalam perspektif yang lebih praktis meliputi keseimbangan jasmani-rohani, material non material, individu dan sosial.

¹⁰⁶ Afifa Rangkuti, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam". Jurnal Pendidikan Islam, Vol. VI No.1, Januari-Juli 2017

Penggunaan dana desa dan aloaksi dana desa di Kecamatan Sendang Agung sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, drainase, pembuatan gapura atau batas desa, irigasi dan renovasi kantor-kantor desa yang mencapai kisaran 60% hingga 80% dari total dana tersebut, dan untuk bidang pemberdayaan masyarakat hanya berkisar anatar 5% hingga 10% setiap tahunnya. Jumlah tersebut sangat kecil karena tidak sebanding dengan bidang pembangunan dan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah tentang prioritas penggunaan dana desa dan alokasi dana desa yaitu untuk bidang pembangunan desa tidak boleh lebih dari 70%. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan kebijakan dana desa dan alokasi dana desa belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan nilai dasar ekonomi islam yaitu keadilan.

Terkait permasalahan pada pengalokasian yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah pusat, pemerintah desa juga tidak menjunjung tinggi nilai kebenaran dan kejujuran dalam nilai-nilai dasar ekonomi islam yaitu keadilan pada penggunaan anggaran dana desa dan alokasi dana desa. karena pemerintah desa hanya mengalokasikan dananya sebagian besar hanya untuk pembangunan fisik, sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat masih sangat minim.

Pemerintah desa selayaknya adil dalam pembagian anggaran yang merujuk kepada nilai keadilan dengan cara menjunjung tinggi kejujuran dan konsistensi pada kebenaran, karena adil bukan berarti

sama rata tetapi melihat mana yang lebih prioritas untuk dianggarkan terlebih sesuai kebutuhan masyarakat yang dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

- b. Tanggung jawab atau amanah, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan secara pribadi dan kelompok tertentu.

Konsep tanggung jawab melahirkan perbuatan yang dilakukan harus memberi kebaikan (masalah) sebesar-besarnya pada masyarakat, konsep tanggung jawab melahirkan sikap kepedulian terhadap lingkungan sosial, yang memberikan dampak bukan hanya pada kebaikan individu secara pribadi, namun kebaikan yang berdampak pada masyarakat secara umum. Konsep tanggung jawab lahir secara sukarela dari dalam diri manusia bukan paksaan, dengan demikian melahirkan kesadaran untuk menjadi diri yang lebih baik.

Tanggung jawab adalah suatu hal yang harus dimiliki oleh setiap makhluk ciptaan tuhan, khususnya manusia sendiri harus memiliki rasa tanggung jawab. Tanpa adanya rasa tanggung jawab di dalam hati manusia, maka akan terjadi ketidak teraturan dalam roda kehidupan di dunia ini, dan menjadi terasa tidak mungkin berjalan suatu kehidupan tanpa adanya rasa tanggung jawab, tanggung jawab itu berupa

tanggung jawab terhadap tuhan dan tanggung jawab terhadap sesama mahluk. Sistem ekonomi syariah yang diterapkan memiliki sifat tanggung jawab yang penuh, baik tanggung jawab tuhan maupun terhadap manusia. Tanggung jawab ini harus dimiliki oleh para pelaku ekonomi dalam melakukan aktifitasnya, karena apa bila tidak adanya rasa tanggung jawab dari pelakunya maka kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur.

Berdasarkan implementasinya kebijakan dana desa dan alokasi dana desa di Kecamatan Sendang Agung, dari total anggaran untuk bidang pembangunan desa mencapai 80% dan kemudian hanya 10% untuk bidang pemberdayaan masyarakat, padahal sesuai dengan peraturan pemerintah seharusnya untuk bidang pemberdayaan masyarakat mencapai 30%. Dalam bidang pemberdayaan masyarakat disini adalah hal yang sangat diharapkan oleh sebagian besar masyarakat, karena dalam bidang pemberdayaan yang bersifat mengembangkan potensi ekonomi lokal tersebut akan menggerakkan ekonomi desa sekaligus juga akan banyak membuka lapangan pekerjaan baru dan bisa menurunkan angka pengangguran serta mengurangi angka kemiskinan.

Pemerintah desa dinilai belum memiliki rasa tanggung jawab secara penuh dalam mewujudkan kemaslahatan dalam kebijakan ini. Karena pemerintah desa masih belum melaksanakan dengan sikap kepedulian terhadap lingkungan sosial, masih banyak masyarakat yang

menganggap bahwa pemerintah desa dinilai kurang bertanggung jawab dalam pengalokasian dana desa, sehingga belum memberikan dampak kebaikan terhadap seluruh masyarakat luas. Hal ini juga disebabkan oleh rendahnya kesadaran dari masyarakat dan pemerintah pusat dalam hal pengawasan menjadi penyebab belum maksimalnya penggunaan dana desa dan alokasi dana desa di Kecamatan Sendang Agung.

Pemerintah desa dapat memanfaatkan bukan menguasai secara mutlak dana desa dan alokasi dana desa melainkan harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guna mengurangi kemiskinan agar menjadi lebih baik secara perekonomian dan kualitas hidup.

- c. Takaful (jaminan sosial), adanya jaminan sosial di masyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik di antara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertical, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.

Adanya rasa tanggung jawab sosial yang tidak hanya mengukur kebaikan dari hasil usaha yang diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi berkaitan juga tentang kepentingan (kebebasan) perorang dengan kepentingan umum yang harus dipelihara antara keseimbangan hak dan kewajiban yang harus terealisasi. Bahwa sebagian harta kita juga ada hak orang lain yang harus kita keluarkan.

Islam telah menugaskan negara untuk menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat

Islam. Islam membagi kebutuhan dasar (al-hajat al-asasyiah) menjadi dua, pertama kebutuhan dasar individu, yaitu sandang, pangan dan papan. Kedua kebutuhan dasar seluruh rakyat (masyarakat), yaitu keamanan, kesehatan dan pendidikan.¹⁰⁷

Terkait kebijakan ini dalam nilai jaminan sosial, pemerintah pusat telah mengucurkan sebuah bantuan dana yang berupa dana desa dan alokasi dana desa yang diberikan kepada pemerintah desa, bantuan dana tersebut bertujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan, karena masih banyak terdapat ketidak sesuaian dalam penggunaan dana desa tersebut.

Berdasarkan analisis diatas, bahwasanya pelaksanaan dana desa dan alokasi dana desa dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung dilihat dari nilai-nilai dasar ekonomi islam kurang dalam berlaku adil dan bertanggung jawab. dana desa dan alokasi dana desa hanya sebagai bentuk jaminan sosial kepada masyarakat yang diberikan pemerintah agar terciptanya hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat. Karena masih banyak ditemukan ketidaktepatan dalam menentukan anggaran dana tersebut.

¹⁰⁷ Notoeidagdo, Rohiman. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Amzah. 2016) h.102.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, pengelolaan data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Hasil penelitian secara parsial variabel jumlah dana desa berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung tahun 2015-2018. Hal ini berarti semakin tinggi atau rendahnya jumlah dana desa maka akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan Kecamatan Sendang Agung, sehingga terdapat kesesuaian dengan tujuan PP Nomor 60 Tahun 2014. Namun masyarakat mengatakan bahwa jumlah dana desa tidak ada pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan, hal ini disebabkan oleh penggunaan dana desa hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat masih sangat terbatas.
2. Hasil penelitian secara parsial variabel alokasi alokasi dana desa berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung tahun 2015-2018. Hal ini berarti semakin tinggi atau rendahnya jumlah alokasi dana desa maka tidak akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan Kecamatan Sendang Agung. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggaran alokasi dana desa masih kecil dan penggunaan alokasi dana desa tersebut hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat masih

sangat terbatas. Maka terdapat ketidaksesuaian dengan tujuan dari Permendagri Nomor 37 Tahun 2007.

3. Hasil penelitian secara simultan variabel jumlah dana desa dan jumlah alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung tahun 2015-2018. Secara bersama-sama pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 19,3%, sedangkan selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain. Maka terdapat kesesuaian dengan PP Nomor 60 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 bahwa secara garis besar tujuan dari kebijakan dana desa dan alokasi dana desa adalah menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antar desa.
4. Perspektif Ekonomi Islam mengenai dana desa dan alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung belum sesuai dengan nilai-nilai dasar Ekonomi Islam yaitu: keadilan, terkait permasalahan pada pengalokasian yang tidak sesuai peraturan pemerintah, pemerintah desa hanya mengalokasikan dananya sebagian besar hanya untuk pembangunan fisik, sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat masih sangat terbatas. Tanggung jawab, Pemerintah desa belum mengalokasikan secara bijak dan bertanggung jawab, Berdasarkan implementasinya dana desa dan alokasi dana desa, pemerintah desa belum ada tanggung jawab secara penuh dalam mewujudkan kemaslahatan dalam kebijakan ini, Pemerintah desa masih belum tepat sasaran dalam mengalokasikan anggaran kebijakan tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, dari penelitian ini penulis menyarankan beberapa hal berikut :

1. Untuk pemerintah ataupun instansi terkait kedepan diperlukan kesiapan desa melalui penguatan kapasitas SDM, selain itu pemerintah juga perlu melakukan pembinaan, pendampingan, dan pemantauan yang lebih terarah dan berkesinambungan kepada desa. Di sisi lain, diperlukan penguatan kordinasi, konsolidasi dan sinergi terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan desa dari tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan hingga tingkat desa.
2. Untuk akademisi ataupun bagi instusi terkait perlu diadakan penelitian selanjutnya untuk penyempurnaan penelitian ini dengan menambah jumlah sampel data yang akan diteliti dan memperpanjang waktu periode penelitian agar hasil yang didapatkan akurat dan bervariasi. Selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian mengenai seberapa besar dampak dari aspek kebijakan dana desa dan alokasi dana desa untuk mengentaskan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdullah Ramdani, Muhammad Ali Ramdani, Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, *Jurnal Publik*, Vol. 11 No.01 Januari 2017.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Al-arif, M Noer Rianto, *Teori Makro Ekonomi Islam*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Amirus Sodiq, Konsep Kesejahteraan dalam Islam, *Jurnal Equilibrium*, Vol. 3 No.2, Desember 2015.
- Chalid, Nursiah dan Yusuf, Yusbar, Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 22 No 2, Juni 2014.
- Christina Usmaliadanti, Analisis Pengaruh Tingkat kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah sekor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan manusia Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009, *Disertasi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang*, 2011.
- Departemen Kementerian Agama, *Al Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Hefrizal, Hendra, et. al. Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan, *Kompak*: Februari 2017
- Husein Umar, *Metode Riset Bisnis Panduan Mahasiswa Untuk Melakukan Riset Dilengkapi Contoh Proposal Dan Hasil Riset Bidang Manajemen Dan Akuntansi Cetakan Ke II* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Irfan Syauqi, Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017.

- Jaenal Efendi, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Disertasi Program Studi Ekonomi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, Jakarta: 2005.
- Juliansah Noor, *Metodelogi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi Dan Karya Ilmiah* Jakarta: Kencana, 2011.
- Kartini Hartono, *Pengantar Metodologi Research* Bandung: Kencana, 1998.
- Lukman Hakim, *prinsip prinsip ekonomi islam*, Jakarta: Airlangga, 2012.
- Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: ANDI, 2002.
- Mudjarat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi Keempat* Jakarta: Erlangga, 2013.
- Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta: YKPN, 2002.
- N. Gregory Mankiw, Euston Quah, Peter Wilson, *Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Nilam Indah Susilowati, Dwi Susilowati, Samsul Hadi, Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Belanja Modal dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Di Jawa Timur, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vo; 1 Tahun 2017.
- Nurul Huda, et. al. *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2015.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Purwanto, *Statistika Untuk Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.

Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Sofyan Siregar, *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.

Sri Mulyono, *Statistik Untuk Ekonomi & Bisnis Edisi Ketiga*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1990.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2014.

Suharmis Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Rafika Aditama 2009.

Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Mikro Pespektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002.

Syamsul Amar, *Kajian Ekonomi Tentang Kemiskinan Di Perdesaan Provinsi Sumatera Barat*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 7 No. 2 2002.

Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik*, Jakarta: FISIP Universitas Maestopo Beragama, 2014.

Tri Wahyu Rejeginingsih, *Identifikasi Penyebab Kemiskinan Di kota Semarang Dari Dimensi Kultursal*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.72 No.1, Juni 2011.

Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.

SUMBER LAINNYA (ON-LINE)

Badan Pusat Statistik, Indikator Kemiskinan,(On-line) tersedia di: www.bps.go.id. (7 April 2019), Pukul 23:42 WIB

Badan Pusat Statistik, Jumlah Keluarga Miskin Kecamatan Sendang Agung 2019 (On-line) tersedia di: www.bps.go.id. (13 Januari 2019), Pukul 15.07 WIB

Hukum Ekonomi Islam, (ON-Line) tersedia di: <http://Islam.cendikia.com> / 2014 / 02 / *hukum-ekonomi-islam-dalam-sumber-hukum-Al-Qur'an*. (28 maret 2018) pukul 21.37

Kamus Besar Bahasa Indonesia” (On-Line) tersedia di <http://kbbi.web.id>/pengaruh (22 Maret 2019), pukul 13.02 WIB

Lampiran Permendagri (On-line), tersedia di keuda.permendagri.go.id (13 Januari 2019) pukul 10.39

Mekanisme Penyaluran Dana Desa (On-line), tersedia di www.djtk.kemekeu.go.id (7 April 2019) pukul 16.38 WIB

Sasaran dan tujuan Dana Desa (On-line), tersedia di www.djpk.kemekeu.go.id (23 Maret 2019) pukul 10.38 WIB

Terjemah Dan Tafsir (On-Line) Tersedia Di: <https://www.indonesiaquran.com> (20 Januari 2019). Pukul 15.01

Lampiran 3

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		.34972148
	Absolute		.160
Most Extreme Differences	Positive		.117
	Negative		-.160
Kolmogorov-Smirnov Z			.962
Asymp. Sig. (2-tailed)			.313

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	11.031	5.272		2.092	.044		
Dana Desa	.499	.179	.705	2.781	.009	.381	2.628
Alokasi Dana Desa	-.726	.371	-.496	-1.956	.059	.381	2.628

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.439 ^a	.193	.144	.36016	2.193

a. Predictors: (Constant), Alokasi Dana Desa, Dana Desa

b. Dependent Variable: Kemiskinan

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.603	2.183		1.650	.108
Dana Desa	.056	.074	.206	.755	.456
Alokasi Dana Desa	-.215	.154	-.382	-1.400	.171

a. Dependent Variable: ABS_RES

Hasil regresi linier berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11.031	5.272		2.092	.044
Dana Desa	.499	.179	.705	2.781	.009
Alokasi Dana Desa	-.726	.371	-.496	-1.956	.059

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Hasil Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11.031	5.272		2.092	.044
Dana Desa	.499	.179	.705	2.781	.009
Alokasi Dana Desa	-.726	.371	-.496	-1.956	.059

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Hasil uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.022	2	.511	3.938	.029 ^b
	Residual	4.281	33	.130		
	Total	5.302	35			

a. Dependent Variable: Kemiskinan

b. Predictors: (Constant), Alokasi Dana Desa, Dana Desa

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.439 ^a	.193	.144	.36016

a. Predictors: (Constant), Alokasi Dana Desa, Dana Desa

LAMPIRAN-LAMPIRAN